

POLA GRIDIRON KINSHIP PURI SUKAWATI SEBAGAI REPRESENTASI PENATAAN KAWASAN KOTARAJA AKRAB LINGKUNGAN

Anak Agung Gde Djaja Bharuna S*

Abstract

Puri is seen as 'ista dewa'- a place for the king. In the era of ancient Java there was no clear difference between *puri* and *pura* – *ista dewata* which is a sacred complex to carry out religious activities to worship deva. *Puri* and *pura* in Sanskrit mean cit, palace, city centre, kingdom, or settlement that is surrounded by a high wall. But later on, *pura* develops a new meaning as a sacred place for Bali Hindu, while *puri* still means a palace.

As a comparative study, this paper develops its arguments based on a literature review and physical observation of the Puri Agung Sukawati and its surroundings. This *puri* is located in Sukawati District of the Gianyar Regency. This *puri/kotaraja* still holds a representative historical record. This study aims at analyzing the intimate relationship between the *puri* and its environment. This manifests itself particularly in the accommodation of various social dimensions within the lay out and spatial arrangement of the palace.

This paper proposes that Puri Sukawati has a specific spatial pattern. Apart from its spatial structure, the physical layout of this *kotaraja* incorporates as a concept and the philosophy of a gridiron planning. Its buildings are designed based on Balinese traditional architectural principles and its structural composition demonstrates an ideal *kotaraja/puri* plan. This overall strategy represents intimacy and is designed in accord with the social environment that each kingdom contains. Furthermore, this spatial uses and spatial pattern of a *puri* is a reflection of the complexity of its social structure which is represented by the various clans who live in it.

The spatial hierarchy of Puri Sukawati is therefore set to

* Dosen Tetap Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Udayana. Email: djajabharunaa@yahoo.co.id

accommodate various positions, tasks and duties executed by each clan. Based on archeological and historical evidence, Balinese traditional architectural forms and practices of Puri Sukawati, including its sacred and profane meanings and symbols, are consistently discovered in every spatial arrangement. This overall spatial matrix does not come in a single form, but in a variety of different representations.

Keywords: gridiron-kinship, puri/kotaraja, clan

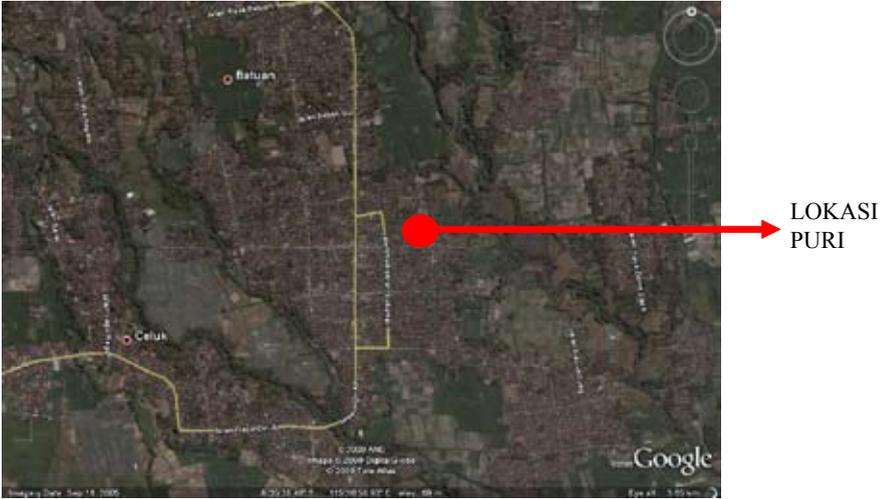
1. Lingkungan Fisik dan Lanskap Kotaraja Sukawati –Kota Kecamatan

Sebagai sebuah pusat kota Kecamatan, Sukawati sebagaimana beberapa kota sejenis di wilayah Kabupaten Gianyar (Kecamatan Gianyar, Kecamatan Ubud, Kecamatan Payangan, dan Kecamatan Tegalalang), dimana pusat kota-kotanya selalu dicirikan dengan adanya ‘*Catus Patha*’ (pola palang/silang) selaku inti kawasan (± 0 KM), sert keberadaan kompleks puri (Puri Agung Sukawati) di sudut timur laut perempatan.

Kotaraja disini merupakan istilah untuk menyebut ibukota kerajaan pada masa kerajaan.¹ Disebutkan pula bahwa, menurut lontar *Ekaprataming Brahma Sakti Bujangga*, suatu pusat negara dibangun berdasarkan konsepsi ‘*Caturlokapala*’ dan kemudian diejawantahkan secara nyata berbentuk *catuspatha*. *Catuspatha* adalah pola palang (*tapak dara*), merupakan pertemuan empat ruas jalan yang mengarah ke masing-masing mata angin (Timur-Barat, Utara-Selatan), menyimbulkan bumi dan melambangkan ‘swastika’ sebagai tanda keberuntungan.

Kotaraja Sukawati, dengan kompleks Puri Agung Sukawati terletak di wilayah administratif Banjar Dinas/Dusun Mudita, Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar. Berbatasan dengan Desa Celuk di bagian barat, serta Desa Batuan di bagian utara.

1 IGM Putra, Pustaka Arsitektur Bali, IAI Bali ,2008



Lokasi Puri Ageng Sukawati, Kec. Sukawati-Gianyar

Secara umum, lingkungan fisik wilayah Kotaraja Sukawati merupakan morfologi kawasan hunian tipologi tradisional Bali, serta hunian campuran/perdagangan khususnya di pusat-pusat kawasan/sub kawasan. Hal ini terkait dengan perkembangan dan pengembangan potensi setempat, khususnya di bidang kesenian dan budaya. Wujud nyatanya adalah dengan kehadiran fasilitas/bangunan 'Pasar Seni Sukawati', yang sudah terkenal dan dikenal parawisatawan. Hampir sebagian besar bangunan perdagangan yang ada di seluruh kawasan kotaraja berorientasi pada komoditi seni/kesenian dan budaya Bali. Di sisi lain, khususnya pada daerah *periferi* kawasan, terbentang lanskap persawahan dan tegalan penduduk/masyarakat. Karena demografi, matapencaharian penduduk $\pm 90\%$ mengandalkan sektor pertanian. Lebih mengkhhusus di batas wilayah Barat, lanskap jurang (DAS) Tukad/Sungai Ayung, saat ini sudah mulai di'likir' para pengembang/pembangun guna fungsi akomodasi wisata.

Bentukan fisik arsitektural kawasan sekitar pusat kotaraja, saat ini sebagian besar sudah mengalami perubahan serta sesuai dengan fungsi kekinian. Namun gurat-gurat

ornamentasi tradisional Bali, setidaknya masih menyelubungi struktur beton tulang bangunan publik. Selanjutnya arsitektur Puri Ageng Sukawati khususnya, sebagaimana puri-puri di Bali yang dalam kesejarahannya berdiri sekitar abad ke-17-an, hampir keseluruhan serupa, mengacu pada tata atur arsitektur tradisional Bali. Mulai tata letak dalam pola permukiman, sampai pada pembagian *zone* didalam kompleks puri, serta tata bangunan.



Kompleks Puri Ageng Sukawati

2. Latar Belakang Berdirinya Kerajaan Sukawati - Gianyar²

Berdirinya Kerajaan Sukawati tidak terlepas dari sejarah Kerajaan Semara Pura yang didirikan oleh *Ida Dewa Agung Jambe* (disebut 'jambe' karena ibunya dari Puri Pemecutan Denpasar), karena telah berhasil merebut kembali Kerajaan Gelgel dari kudeta yang telah dilakukan oleh Patih Agung-nya sendiri, yaitu yang terkenal dengan kudeta *I Gusti Agung Maruti* pada zaman *Ida Sri Dalem Dimadia Budha Kepakisan* (ayah Ida Dewa Agung Jambe).

2 Babad Dalem Sukawati, Mahagotra Sentana Dalem Sukawati, 1996

Untuk menunjukkan rasa terima kasih yang sangat dalam dan subakti kembali kepada Ida Sri Dalem di Semara Pura Klungkung, adalah suatu itikad baik dari Raja Mengwi-Badung (sejawat I Gusti Agung Meruti), untuk menghaturkan sebuah kerajaan yang mengambil lokasi di pesisir Timur daerah kekuasaan Kerajaan Mengwi (yaitu di Alas Timbul) (sekitar tahun 1710-1770).

Setelah semua urusan selesai di Semara Pura, maka Raja Mengwi segera menyiapkan pembangunan kerajaan baru di Panegara Timbul. Beliau mendatangkan tukang-tukang ahli '*wewangunan*' keraton dari Blambangan dan juga beliau berkeinginan agar penataan kota kerajaan di Panegara Timbul agar seperti penataan kota kerajaan di Majapahit. Jalannya '*jimbar-jimbar*' (lebar-lebar) dengan menggunakan pola '*pempatan agung*'. Semua tenaga '*undagi*' dikerahkan untuk pembuatan kerajaan baru di Panegara Timbul. Tata letak (*tegak/genah*) keraton mengambil posisi/*sukat* seperti keraton di Semara Pura Klungkung yaitu pada posisi Kelod Kauh (Barat Daya) dari posisi *Catusptaha* (di daerah Grokgak Sukawati sekarang), dengan posisi di sebelah Selatan jalan serta pintu masuk/gerbang menghadap ke Utara yang bertumpang tiga, sangat berwibawa dan agung. *Bale Lembu Agung* '*tegeh tur agung pisan*' (besar dan berwibawa) dan dikelilingi oleh telaga dengan berbagai tanaman. *Bale tegeh* berdiri kokoh dan megah ('*ngenjik ring bucun ancak sajine*'). Di sebelah utara keraton dibangun sebuah alun alun yang sangat luas (kira-kira satu hektar), dengan pohon beringin di masing masing sudutnya serta dengan sebuah wantilan bertumpang tiga yang sangat besar berada di tengah-tengah alun-alun. Di sebelah timur alun-alun berseberangan jalan dibangun tempat '*parahyangan*' keraton berupa *Pura Penataran Agung*, dan di sebelah timur parahyangan dibangun, *Pura Kawitan* (ini dibangun /terjadi setelah beberapa generasi berlalu). Di sebelah selatan *Pura Penataran Agung* dibangun pertamanan dengan segala jenis tanaman, segala jenis buah, segala jenis pohon ('*sarwa*

bunga /sekar, sarwa wohwohan, lan taru'). Dan sebuah telaga yang luas dengan sebuah bangunan *Bale Bundar* di tengah-tengah telaga itu.

Penataan pola kota kerajaan (*Kotaraja Panegara Timbul*) dengan pola 'pempatan agung' (pola grid dengan jalan /akses yang sangat lebar-lebar, dimana di setiap perempatan terdapat sebuah bangunan *Wantilan*). Selanjutnya nama kotaraja kemudian berganti menjadi *Kotaraja Sukawati*. Wilayah kekuasaan Kerajaan Sukawati saat itu membentang dari utara berbatasan dengan Kintamani (Gunung Batur, sebagai batasnya) ke arah selatan sampai ke laut. Di timur adalah Tukad Pakerisan dan Barat adalah Tukad Ayung. Jadi, bentang alam yang membatasi wilayah kerajaan adalah *segara/laut –gunung lan tukad /sungai*.

Apabila dilihat dari persiapannya, maka Kerajaan Sukawati adalah suatu kerajaan yang 'sangat direncanakan' keberadaannya. Mulai dari pemilihan wilayah, penataan kotaraja, pemilihan site dan persiapan penduduknya, semuanya merupakan persiapan pembentukan sebuah kota kerajaan yang ideal dan sangat terencana. Hal ini dapat dilihat dari pola-pola yang diwarisi sampai sampai saat sekarang walaupun ada sedikit pergeseran posisi akibat perubahan struktural kerajaan dimasa lampau, namun pola kemasyarakatannya dan pola makro kotaraja masih bisa diamati hingga sekarang.

3. Konsepsi Arsitektur Bali Selaku Dasar Lingkung Bina yang Akrab Lingkungan

Landasan konsep tradisional yang berprinsip bahwa wadah buatan (arsitektur – lingkungan binaan) hendaknya merupakan satu kesatuan dengan lingkungan alamnya selaku aspek wadah. Hanya dengan demikian manusia/penghuni selaku isi mendapatkan rasa kemantapan, kenyamanan.

Maka '*Umah*' (rumah tinggal), '*banjar*' (institusi kekerabatan beberapa perumahan), desa, dan lain sebagainya selaku wadah arsitektur (*bhuana* alit) disusun meniru alam semesta, bahkan

diupacarai, hingga secara spiritual benar-benar dirasakan sebagai *bhuana agung*. Implementasinya terhadap perancangan wadah buatan/arsitektur, dipadankanlah diri manusia selaku maket/model sejak masih berupa janin – selaku isi, dimana rahim ibu selaku wadah dalam keselarasan hidup "*Manik ring Cecupu*" (janin dalam kandungan ibu – *fetus in the womb*).³ Arsitektur tradisional Bali menjaga keseimbangan unsur-unsur pembentuk ini. Bahan-bahan bangunan dari arsitektur yang diambil dari alam sekitar, adalah untuk keselarasan visual dan keseimbangan daur ulang manusia, lingkungan dan arsitekturnya itu sendiri, yakni keseimbangan dari kesamaan unsur pembentuk.

Atma (jiwa), *Angga* (fisik), dan *Kaya* (tenaga) adalah falsafah yang disebut dengan "*Tri Hita Karana*", merupakan 3 (tiga) kutub yang diyakini masyarakat Bali, menjadikan suatu kehidupan di bumi. Manusia/masyarakat Bali, alam, dan arsitekturnya diterima sebagai suatu kehidupan setelah melalui proses ritual dalam kelahirannya. Jiwa, fisik, dan tenaga dalam kesatuannya mewujudkan suatu kehidupan yang berperanan. Arsitektur tradisional Bali juga terwujud dari stu kesatuan ketiga kutub tersebut. Seperti manusia, bangunan juga diterima sebagai 'kehidupan' *Tri Hita Karana*. Demikian pula halnya dengan perumahan, banjar, dan desa, juga diterima dan diperlakukan sebagai suatu representasi kehidupan *Tri Hita Karana*. Masing-masing terwujud dari kesatuan *parhyangan* (tempat pemujaan – *Atma*/jiwa), *pawongan* (perumahan/lingkungan binaan – *Angga*/fisik), dan *palemahan* (manusia – *kaya*/tenaga).⁴ Arsitektur tradisional Bali berorientasi pada konsepsi filosofis "*Narwa Sanga*", sembilan lintasan yang masing-masing berkedudukan pada arah tertentu. Dijiwai, dihuni, diwarnai, dan dipersenjatai oleh kekutan-kekuatan tertentu dengan penataan ruang dan waktu masing-masing dalam wujud arsituralnya. Kesembilan

3 I Gusti Ketut Kaler, *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali* jilid 1 dan 2, Denpasar: Bali Agung, 1982

4 PHDI Pusat, 1985

lintasan yang dimaksudkan adalah: terbit-terbenamnya matahari, gunung-laut asal – dan tujuan lintasan aliran sungai membentuk persilangan dua (2) sumbu *kangin-kauh* dan *kajakelod*. Dua sumbu sela *kajakangin-kelodkauh*, dan *kelodkangin-kajakauh* dengan titik pusat silang di tengah menjadikan adanya sembilan (9) arah di bumi, sembilan lubang pada tubuh manusia dan sembilan zona pada penataan massa bangunan. Masing-masing dengan tata nilai atau zonasi fungsi dan peruntukannya, yang dibentuk dan mewadahi *pengider-ider* (arah dan orientasi di bumi).⁵

Di dalam setiap lahan pekarangan (*site area*), kemudian diberlakukan konsep pembagian sembilan tata nilai lahan (*zonning*), yang disebut konsep "*Sanga Mandala*", yang merupakan pengembangan dari konsepsi Tri Angga/pola linier ke pola sektoral dengan berpedoman arah dari *Catus Patha*. Jadi, merupakan sembilan (9) tingkatan nilai ruang pada sembilan zone bumi yang diberlakukan di tingkat desa. Serta pada lahan pekarangan diimplikasikan kemudian melalui tata letak massa bangunan/fungsi-fungsi sesuai dengan tingkatan kepentingannya.⁶ *Geria, Puri, Jero, dan Umah* merupakan tempat tinggal utama masrakat Bali yang lengkap secara tradisi pada masa kerajaan. 'Umah' merupakan tempat tinggal rakyat/masyarakat kebanyakan yang umumnya satuan unit fungsi yang sederhana, ada *pakubon* atau *kubu* adalah tempat tinggal yang sifatnya sementara)ketika berkebun/berladang dan berlokasi disekitar sawah/ladang penduduk.

4. Konsepsi Puri-Kotaraja di Bali

Kotaraja di sini merupakan istilah untuk menyebut ibukota kerajaan pada masa kerajaan (I G. M. Putra, 2008). Disebutkan pula bahwa, menurut lontar *Ekaprataming Brahma*

5 Pemda Dati I Bali, 1974

6 I Nyoman Gelebet, dkk, *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*, Denpasar: Depdikbud Bali, 1986

Sakti Bujangga, suatu pusat negara dibangun berdasarkan konsepsi '*Caturlokapala*' dan kemudian diejawantahkan secara nyata berbentuk *catuspatha*. *Catuspatha* adalah pola palang (*tapak dara*), merupakan pertemuan empat ruas jalan yang mengarah ke masing-masing mata angin (Timur-Barat, Utara-Selatan), menyimbolkan bumi dan melambangkan 'swastika' sebagai tanda keberuntungan.⁷

Lokasi/tata letak puri selaku bekas pusat/ibukotaraja pada masanya, dibangun didasarkan atas konsepsi *Catur Lokaphala* dan kemudian diejawantahkan secara nyata berbentuk *Catuspatha*. '*Catuspatha*' adalah pola palang (*tapak dara*), merupakan pertemuan empat ruas jalan yang mengarah ke masing-masing mata angin (timur-barat, dan utara-selatan), menyimbolkan bumi dan melambangkan 'swastika' sebagai tanda keberuntungan.

Dari pertemuan empat ruas jalan yang merupakan ruang kosong ditentukan letak kediaman pemegang kekuasaan negara/kerajaan atau 'puri'. Di pusat kotaraja inilah dibangun puri dengan berbagai fasilitasnya. Kalau zona pusat ini disebut ring satu (1), maka pada ring 2 (dua) sering merupakan tempat kedudukan para keturunan atau kerabat raja yang disebut *jero* atau *puri anyar*. Ruas-ruas jalan pembentuk '*catuspatha*' memiliki simpang empat yang menjadi '*lawu*' atau '*satelit*'nya *catuspatha*⁸ Puri sebagai kedudukan raja pemegang kekuasaan tertinggi di suatu wilayah kerajaan menempati salah satu sudut *catuspatha* yaitu di timur laut (*utama*), ada pula di barat daya (*werdhi*), dan sedikit yang mengambil posisi di barat laut (*gni astra* dan *dana*). Keutamaan puri pula ditentukan oleh dua hal yaitu fasilitas kotaraja dan jumlah palebahan. Fasilitas di luar puri/kotaraja (*bencingah puri*) terdiri dari atas tiga (3) fasilitas kerajaan yaitu *wantilan* (bangunan umum), pasar, dan taman rekreasi yang

7 I GM Putra, *Pustaka Arsitektur Bali*, IAI Bali 2008

8 I GM Putra, *Pustaka Arsitektur Bali*, IAI Bali 2008

menempati tiga sudut lainnya.

Dalam *Asta Kosali (L.05.T)* disebutkan bahwa, 'perumahan orang-orang berkasta utama, tidak boleh di daerah *teben* (hilir) dari perumahan kaum rakyat kebanyakan (kasta *sudra*). Jangan dilanggar peraturan ini, bila dilanggar, hilang kebahagiaannya, sakit-sakitan dan akhirnya meninggal dunia.'⁹

Ketentuan ini erat kaitannya dengan puri sebagai pusat kerajaan/kotaraja, pusat kekuasaan, dan pusat budaya, serta lebih menghusus lagi bahwa puri tentu merupakan tempat tinggal kasta utama, sebagai tempat bersemayamnya raja yang berasal dari kelas penguasa. Puri harus berada di daerah lebih tinggi, guna dapat 'mengayomi, mengawasi, melindungi' 'kekuasaannya. Secara filosofis dalam konsep *Tri Lokal/Tri Angga*, disebut bahwa orientasi sumbu bumi dan sumbu religi, menjadikan zonasi-zonasi yang mengarah pada kondisi yang dianggap baik-*utama*, sedang-*madya*, serta buruk-*nista*.

5. "Lay Out" Kawasan Kota Raja / Puri Sukawati Kini

Sebagai suatu kompleks hunian, kawasan Kotaraja/Puri Ageng Sukawati juga mengikuti tata aturan pembangunan/pola penataan arsitektur tradisional Bali, yang disebut *Nyatur Muka/Nyatur desa*, dengan *Pempatan Agung* sebagai 'core'/inti kawasan. Puri Ageng Sukawati terletak pada arah *Kaja-Kangin* (Timur-Laut) perempatan, berseberangan langsung dengan posisi bangunan Pasar Seni Sukawati yang sudah banyak dikenal (arah *Kelod-Kauh/Barat-Daya*).

9 I Nyoman Gelebet, *Terjemahan Asta Kosala dan Asta Kosali (L/05.T)* Dirjen Cipta Karya, Dep.PU, 1970



“Pempatan Agung” Puri Ageng Sukawati

Karena perkembangan kondisi saat ini, seperti juga kehadiran pasar seni, bangunan serupa (tapi tak sama) juga hadir di sisi *Kelod-Kangin/Tenggara*, meski fungsi utamanya selaku pasar ‘retail’ komoditi sehari-hari, dan di beberapa los terdapat juga ‘oleh-oleh khas’ Bali. Sedang di sisi *Kaja-Kauh/Barat-Laut* saat ini difungsikan sebagai pasar ‘senggol’ sekaligus pelataran parkir bagi pengunjung pasar seni.



Tata Letak Bangun-bangunan – Pola “Nyatur Muka” Puri Ageng Sukawati

a. Pola *Gridiron* di Kotaraja Sukawati

Sebagaimana yang telah diurai dalam kesejarahan, keberadaan Puri Ageng Sukawati sangat erat kaitannya dengan kehadiran desa/kecamatan Sukawati saat ini. Oleh karena itu pada zamannya, atas kekuasaan raja yang memerintah, karena pertimbangan *wadwa tatadan* (rakyat bawaan) puri yang terdiri dari banyak *soroh* – klan dari beberapa kasta yang ada dan berkembang, maka pola ‘kota kerajaan’ Sukawati – pada zaman dimana puri sebagai pusat pemerintahan/kekuasaan – ditata atur sedemikian sehingga terbentuklah zona-zona peruntukan (khususnya hunian) yang berorientasi pada fungsi dan kewajiban yang diemban sesuai dengan ‘soroh/klan’,

Namun demikian secara keseluruhan, tata letak masing-masing tetap diupayakan memiliki akses yang merata/seimbang. Sehingga pola kota *gridiron* yang ditetapkan, menjadi tepat dan sisa-sisa hal itu paling tidak masih terlihat dengan banyaknya persimpangan (perempatan) diseluruh desa saat ini. Dengan ‘Pempatan Agung’ serta Puri sebagai ‘core’ ditengah.



Pola ‘Gridiron’ - Kecamatan Sukawati

b. Gridiron dan Hubungan Kekarabatan (*Kinship*) di Kotaraja Sukawati

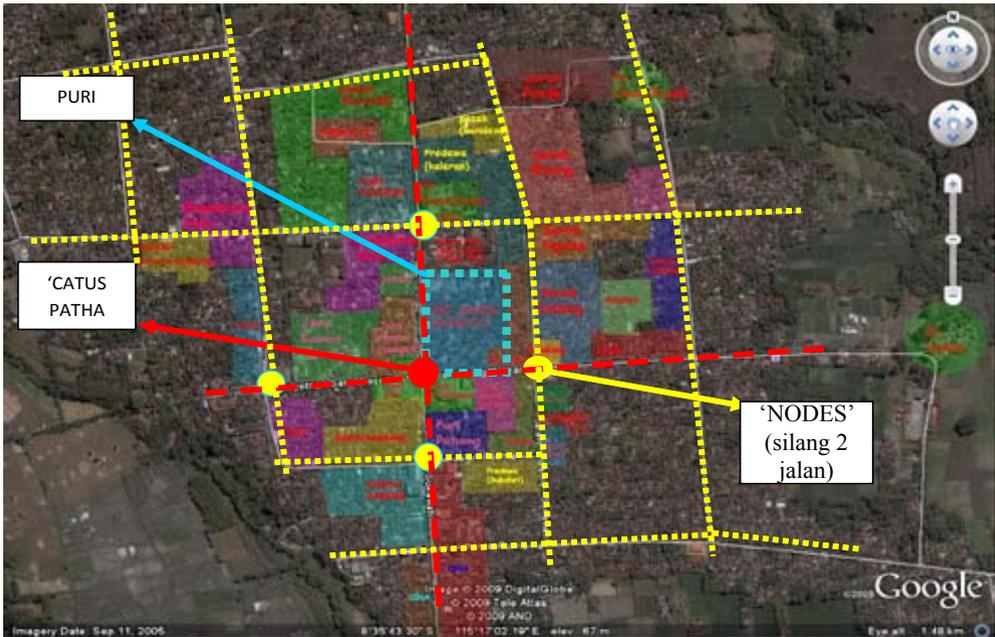
Puri Ageng Sukawati dalam kekiniannya, pada pola 'catuspatha' terletak di zona *kaja-kangin* (timur laut - *Utama*), pasar (seni Sukawawati) di *kelod kauh* (barat daya - *nista*), pasar tradisional (dapat dikatakan mengemban fungsi rekreasi) di *kelod kangin* (tenggara - *nista*), serta areal /pelataran parkir di zona *kaja kauh* (barat laut - *madya*). Pada lapis/ring kedua dan ketiga pusat 'catuspatha, terdapat perumahan masyarakat (*puri* 'biasa', *jero*, *grya*, *umah*) dengan beberapa *nodes* persilangan ruas jalan dari pola *grideron* pola permukiman desa/kota kecamatan Sukawati.

Gridiron & Kinship di Kotaraja Sukawati



**TATALETAK / PELEMAHAN WILAYAH SEKITAR
PURI AGENG SUKAWATI BERDASARKAN SOROH /KLEN**

Lay out Gridiron & Kinship di Kotaraja Sukawati



**TATALETAK / PELEMAHAN WILAYAH SEKITAR
PURI AGUNG SUKAWATI BERDASARKAN SOROH /KLEN**

Seperti yang tersaji dalam gambar *lay-out* kawasan kotaraja Sukawati, perencanaan wilayah sudah mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan dengan ‘pengayoman, pengawasan, sekaligus pengamanan’ kekuasaan raja pada zamannya, baik di dalam maupun dari luar. *Lawa-lawa*/pusat-pusat kawasan ‘satelit’ juga diberikan ‘wewenang’ pengembangan tersendiri, guna pemerataan kesejahteraan, namun sifat birokrasi semi otonom karena tetap dipusatkan di kotaraja. Strateginya adalah dengan menempatkan para *arya/punggawa* yang masih merupakan bagian dari kekrabatan/kekeluargaan raja (*kinship*). Olehkarenanya, disamping sebab implementasi aspek filosofis ‘*nyatur muka/nyatur desa/nyatur lawa*’, serta pengejawantahan aspek sumbu religi ‘*surya-sewana*’ (arah terbit dan terbenamnya matahari) serta hirarki tata nilai sumbu bumi ‘*kaja/hulu-kelod*/

teben', maka struktur tata ruang dan pola sirkulasi dengan konsep 'Gridiron'/jalan bersilangan menjadi pilihan yang sesuai. Pengejawantahan konsep *Catur Lokapala* ini jamak di hampir seluruh puri/kotaraja di Bali. Saat ini paling tidak pada 8 (delapan) kabupaten di Bali, 'catus patha-catus patha' tersebut ditetapkan selaku 0 KM/pusat-pusat ibukota. Dan hampir selalu di sudut Timur-Lautnya merupakan tempat kedudukan kotaraja/puri pada zamannya.

Khususnya di kotaraja Sukawati menjadi sangat khas. Disamping struktur fisik tata ruang kotaraja selaku pengejawantahan konsep filosofis melalui pola Gridiron, juga merupakan implementasi ideal perencanaan kotaraja/puri yang ideal. Upaya mengakomodasi berbagai kelengkapan struktur kerajaan yang mapan dan mantap sudah dialokasikan pada tata guna lahan yang sedemikian, sehingga fungsi-fungsi mulai blok, sub kawasan sampai kawasan utama menjadi serta sesuai dengan aktifitas-aktifitas/tugas dan kewajiban kelompok-kelompok strata sosial yang berkembang saat itu, dalam tatanan komunitas yang disebut '*soroh*'. *Soroh* dikenal sebagai kelompok masyarakat yang lebih berorientasi pada hubungan kekrabatan/persaudaraan (*clan*) atau *kinship*. Namun terbuka bagi interaksi diantaranya, maupun terhadap klan lainnya. Sehingga tata atur sosial kemasyarakatan menjadi cukup tertib tetapi dinamis.

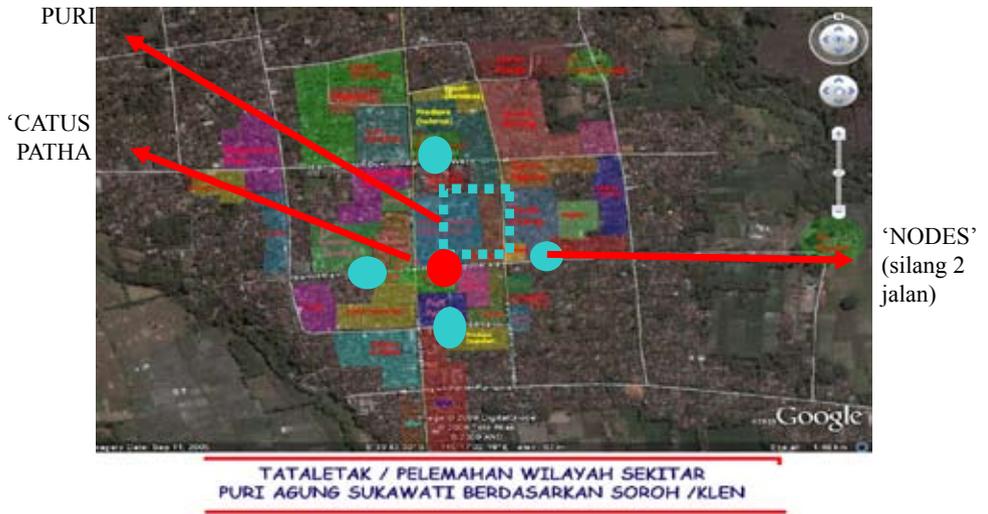
Demikianlah, di kotaraja Sukawati alokasi fungsi lahan secara fisik saat sekarang masih dapat diidentifikasi, meski batasan tidak terlalu pasti. Beberapa '*soroh*' yang ada menyiratkan upaya mengalokasikan struktur tata ruang kotaraja yang terencana layaknya kotaraja yang mapan.

Paling tidak teridentifikasi nilai filosofis '*catur lawa*', seperti;

- *Catuspatha*, pusat ring 1/utama, dengan kedudukan Puri Sukawati di Timur-Laut, melalui persilangan koridor Timur-Barat (Jl. Lettu W.Sutha, sekarang) serta Jl. Raya



TATA LETAK/PELEMAHAN BERDASARKAN KLEN (SOROH) DISEKELING PURI AGUNG



Sukawati koridor Utara-Selatan. Kemudian bagian Barat (Daya)puri berupa pelataran (parkir dan senggol sekarang). Di Barat Laut Pasar Seni Sukawati, serta Tenggara Pasar Tradisional./Seni.

- Pada ring 2, *Lawa* di bagian Utara tempat kedudukan *Puri Kaleran* beserta *nodes* persilangan jalannya.
- Pada ring 2, *Lawa* di bagian Selatan tempat kedudukan *Puri Pahang* beserta *nodes* persilangan jalannya.
- Pada ring 2, *Lawa* di bagian Barat tempat kedudukan *Jero Kawan* beserta *nodes* persilangan jalannya.

Tempat kedudukan 'puri/jero' di setiap *lawa*, sangat erat terkait dengan *kinship* keluarga raja.

Selanjutnya pada ring-ring bagian luar, adalah tempat kedudukan permukiman 'wadwa tatadan'. Teridentifikasi saat ini, seperti ;

- *Clan Brahmana*, penganut *Ciwa* dan *Budha* berlokasi di bagian Barat Laut Puri
- *Clan Pasek*, menyebar mulai dari ring 1 sampai ring terluar

(paling banyak pada ring-ring terluar). Teridentifikasi paling tidak terdapat 3 kekrabatan 'soroh pasek' yang ada di Sukawati, yaitu *Bendesa*, *Pulasari* dan *Bambang*.

- *Clan Sangging*, juga menyebar, terutama di pinggir bagian selatan Wilayah kotaraja.
- *Clan Pande*, tersebar di kawasan bagian utara dan selatan wilayah kotaraja
- *Clan Dalang*, lebih memusat di bagian timur wilayah kotaraja
- *Clan Pradewa* di bagian Utara wilayah kotaraja.

6. Konklusi dan Solusi

6.1 Konklusi

Kotaraja Sukawati, yang saat ini secara administratif menjadi wilayah Kota Kecamatan, masih sebagian besar menyisakan perwujudan dan bentuk arsitektur tradisional (Bali). Meski dibeberapa fungsi, bentuk serta khususnya akibat perkembangan bahan bangunan, terdapat pemakaian material yang mulai berubah. Beton dan kaca menjadi jamak, khususnya pada bangunan-bangunan komersial dan publik lainnya. Merambah pula pada bangunan hunian, seperti pemanfaatan bahan keramik pada lantai, serta genteng pada bahan penutup atap.

Demikianlah, di Sukawati, bentuk dan perwujudan arsitektur di lingkungan sekitar kotaraja/puri secara umum masih menyiratkan implementasi landasan filosofi dan konsep arsitektur tradisional Bali. Di tingkat desa 'pempatan agung' masih eksis sebagai titik pusat/*core*, baik dalam konteks fisik pola kawasan secara menyeluruh (*gridiron*) maupun dalam kaitan fungsi ritual (*pempatan agung/catuspatha*). Dimana atribut konsep filosofis *nyatur muka*, dimana keberadaan puri (Sukawati) pada *karang tuang* di sudut timur-laut, serta 'bangunan-bangunan/ruang publik' masih 'hadir' di ketiga sudut lainnya, meski dengan fungsi serta wujud yang berbeda, sesuai dengan kekinian (Pasar

Seni, Pasar Tradisional, serta Pelataran dlsbnya).

Pada *ring* (lapis) berikutnya tersebar bangunan dengan fungsi-fungsi umumnya, bekas kawasan kotaraja, seperti bangunan hunian baik *Umah, Puri, Jero* maupun *Grya*, termasuk bangunan umum *Bale Banjar* tersebar dan menyebar mengikuti wilayah kekuasaan kotaraja pada zamannya. Pola silang ('gridiron') dengan *nodes* di titik tertentu merupakan *lawu* (satelit) pengembangan pada sub-sub kawasan.

Bangunan *parhyangan*, mulai tempat pemujaan lingkup kecil (*sanggah, pemerajan*), tempat persembahyangan klan/kawitan (*pura panti, dadia, paibon*), termasuk persembahyangan profesi (*pura Swagina; pura Ulunsuwi, Ulun Subak*) sampai *Kahyangan Jagat/Desa/Kahyangan Tiga* eksis pada posisinya masing-masing. Khusus bagi kekrabatan (*kinship*) kotaraja/Puri Ageng Sukawati, berada pada satu arela dengan keberadaan *Pura Penataran Agung Sukawati* di sebelah Utara kompleks puri.

6.2 Solusi / Harapan

Arsitektur lingkung bina kawasan Puri / Kotaraja pada eranya, adalah sebuah warisan budaya selaku sumber daya arkeologi perencanaan kawasan yang akrab / ramah lingkungan, merupakan 'local genius' yang adati, eksistensinya saat ini dalam konteks perencanaan dan perancangan wilayah/kawasan-kawasan kota di Bali, bukanlah merupakan fenomena baru, namun keterkaitan antara keduanya semakin dirasakan pentingnya, bahkan sering menjadi isu sentral di dalam pengembangan konsep-konsep perencanaan dan perancangan kota itu sendiri. Kenyataan ini antara lain disebabkan semakin kaburnya identitas atau jati diri banyak kota-kota (di Bali khususnya) sebagai akibat semakin transparannya sistem informasi antarmasyarakat, globalisasi sistem informasi yang pada gilirannya berpengaruh kepada pembentukan sikap hidup yang bersifat global, serta industri konstruksi cenderung

berorientasi kepada teknologi bangunan, bersumber dari informasi yang sama.

Bagi kawasan kota-kota yang baru tumbuh, khususnya yang tidak memiliki tradisi membangun gedung yang cukup kuat, maka fenomena universalisme didalam cara pembangunan kawasan kota, benar-benar merupakan ancaman bagi lenyapnya jatidiri (*sense of place*) serta citra kawasan/ kawasan kota. Tidak mengherankan apabila kemudian muncul reaksi-reaksi atas laju gerakan universalisme ini dimana banyak kawasan/wilayah kota yang berupaya untuk tetap bisa “berbeda” dengan yang lain. Dengan kondisi berbeda inilah, terlebih lagi apabila unsur-unsur lokal dapat memberi warna tersendiri atas perbedaan tersebut, maka setiap kota atau tempat/wilayah akan memiliki sumber daya yang potensial bagi tumbuh dan berkembangnya daya tarik dari kota tersebut.

Upaya *preservasi* dan *konservasi* dari sumber daya alam (lingkungan), baik yang bersifat alami (natural) maupun buatan manusia yang bermakna budaya maupun historis, kiranya perlu mendapatkan tempat yang penting didalam proses perencanaan dan perancangannya. Dan wilayah kebijakan perencanaan dan perancangan wilayah kota yang tepat akan mampu menyelamatkan kemungkinan punahnya sumber daya budaya, historis, maupun alami. Sebaliknya lemahnya perangkat perencanaan dan perancangan lingkungan perkotaan dan wilayah, telah terbukti merupakan salah satu faktor penyebab utama hancurnya sumber daya yang tak tergantikan tersebut.

Upaya preservasi dan konservasi memang harus disertai dengan pengertian yang cukup mendalam serta mendasar, sehingga makna dan hasilnya benar-benar berguna bagi kehidupan masyarakat secara luas. Artinya, preservasi dan konservasi itu memang penting dengan berbagai pertimbangan seperti telah diungkap sebelumnya, namun peningkatan tingkat

kesejahteraan serta martabat hidup masyarakat adalah penting pula untuk diperhatikan.

Solusi ataupun harapan melalui upaya tersebut diatas kiranya perlu dielaborasi lebih jauh, didefinisikan secara hati-hati, serta ditanggapi secara tepat. Di sini kriteria-kriteria yang bersifat budaya, historis, maupun simbolis kiranya perlu dirumuskan secara seksama dan hati-hati pula. Maka pengertian serta konsep tentang konservasi hendaknya jangan melulu berpegang kepada praktik yang secara tradisional hanya memperlakukan objek konservasi sebagai objek mati, akan tetapi perlu menempatkannya didalam konteks masyarakat yang sedang menjalani proses transformasi sosial budaya yang berlangsung secara cepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aris Munandar, Agus (2005), *Istana Dewa Pulau Dewata*, Komunitas Bambu, Depok.
- Gelebet, I Nyoman (1970), *Asta Kosali (L.04.T) dan Asta Kosali (L.05.T)*, naskah Terjemahan untuk BIC, Dirjen Cipta Karya, Departemen PU, Bali
- Gelebet, I Nyoman (1985), *Arsitektur Tradisional Daerah Bali*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.
- Kaler, I Gusti Ketut (1982), *Butir-butir Tercercer Tentang Adat Bali*, Jilid 1, Bali Agung, Denpasar
- Kaler, I Gusti Ketut (1982), *Butir-butir Tercercer Tentang Adat Bali*, Jilid 2, Bali Agung, Denpasar
- Mahagotra Sentana Dalem Sukawati (1996), *Babad Dalem Sukawati*, Bali
- Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Pusat (1985), *Himpunan Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir terhadap aspek-aspek Agama Hindu, I-IX*, Proyek Peningkatan Prasarana dan Sarana Kehidupan Beragama, Denpasar

Anak Agung Gde Djaja Bharuna S

Pemda Dati I Bal (1974)i, Peraturan Daerah Tingkat I Nomor: 3, 3, 4/
PD/DPRD/1974; Tentang Tata Ruang untuk Pembangunan
Lingkungan Khusus dan Bangun Bangunan, Denpasar

Putra, I Gusti Made (2008), Pustaka Atsitektur Bali, IAI Daerah Bali,
Bali

RTRWP BALI NO 16 TAHUN 2009 SEBAGAI PEDOMAN PENATAAN RUANG DAN LINGKUNGAN BAGI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN*

Putu Rumawan Salain**

Abstract

Environmental issue has been a prominent concern lately. Global warming has demonstrated many forms of climatic change on earth. A notion for a green revolution is launched to ease pressure caused by these climatic changes as well as various environmental degradations that inevitably take place on a daily basis. Being part of the world community, Bali is not excluded from these global conditions. The acceleration of Bali's growth due to the increasing number of tourist visits cannot prevent changes on land utilization. Land has been treated as a commodity. This situation has in return poisoned Bali's social capital heading towards an inclining attitude favoring economic profits more than the tangible as well as symbolic meanings space and the natural environment may have. A local wisdom that aims at maintaining space and its environment is defeated by a goal to obtain financial advantages. This shift is inevitable. But how could it be controlled? In responding to this query, Spatial Plan for Bali No 16 Year 2009 has been instigated to govern and manage matters relating to land uses and the environment. For these roles, this regulation deserves our respect and conformance.

Keywords: environment; land use; Spatial Plan for Bali No. 19 Year 2009

1. Hakikat RTRWP Bali Sebagai Refleksi

Hakikat dari RTRWP Bali sebagai refleksi disajikan untuk mengingatkan bahwa keberadaannya adalah untuk

* Tulisan ini telah dipresentasikan pada seminar "Membangun Bali dalam Kerangka RTRWP" di Ruang Theater Lantai IV FK UNUD, Denpasar 6 Mei 2011

** Penulis adalah Dosen Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Udayana. Email: rumawansalain@yahoo.com

menyejahterakan masyarakat tanpa harus mengoyak alam beserta lingkungannya untuk kepentingan sesaat. Bahkan RTRWP merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang ataupun Jangka Menengah. Dengan demikian posisinya menjadi sentral dan sangat strategis. Untuk keperluan tersebut isi dari penjelasan berikut ini dipetik sepenuhnya dari RTRWP No. 16 (2009:20-21) yang isinya sebagai berikut :

1.1 Tujuan

Penataan ruang wilayah provinsi untuk mewujudkan:

1. ruang wilayah provinsi yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali dan berwawasan lingkungan berdasarkan *Tri Hita Karana*;
2. keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
3. keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi;
4. keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang;
5. pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota;
7. keseimbangan dan keserasian kegiatan antarsektor; dan
8. pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

1.2. RTRWP Sebagai Pedoman Pembangunan

RTRWP Bali merupakan pedoman untuk :

1. penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah;

2. penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah provinsi;
4. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antarwilayah kabupaten/kota, serta keserasian antarsektor;
5. penetapan arahan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi;
6. penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
7. penataan ruang wilayah kabupaten/kota

1.3. Kedudukan RTRWP

1. penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan menjadi matra ruang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah.
2. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Program Pembangunan Tahunan Daerah;
3. acuan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, rencana rinci tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana detail tata ruang kabupaten/kota, dan rencana rinci tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota; dan
4. acuan *sukerta tata palemahan desa pakraman*, yang selanjutnya menjadi bagian dari *awig-awig desa pakraman* di seluruh Bali.

Memperhatikan hakekat RTRWP Bali No 16 tahun 2009 dari sudut tujuan, pedoman dan kedudukan ternyata bahwa peran RTRWP dalam pembangunan demikian penting dan perlu bagi pembangunan Bali yang berkelanjutan khususnya dalam penyelamatan ruang dan lingkungannya yang lambat laun akan berdampak pula pada peri kehidupan sosial budayanya.

Pembangunan berkelanjutan menjadi cita-cita yang harus dicapai melalui penerapan RTRWP.

2. Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Sebagai Pengendali Pembangunan Bali

Tata ruang dan lingkungan hidup seharusnya diperlakukan sebagai obyek sekaligus subyek dalam pembangunan. Dua-duanya dapat dipandang sebagai sahabat seiring untuk menyelamatkan pembangunan berkelanjutan di Bali.

2.1. Pemahaman Tata Ruang dan Lingkungan Hidup

Tata Ruang adalah wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional. Sedangkan Pola Ruang adalah distribusi peruntukkan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi budi daya (Perda Provinsi Bali No.16 Tahun 2009;10-11).

Sedangkan yang dimaksudkan dengan lingkungan hidup menurut Undang–Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bab I pasal 1 menuliskan bahwa yang dimaksud dengan lingkungan hidup adalah

kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa lingkungan hidup meliputi ruang dimana berbagai komponen lingkungan hidup menempati dan melakukan proses. Artinya dimanapun terdapat komponen lingkungan hidup akan terdapat ruang yang mengelilinginya, sehingga antara ruang dan komponen

lingkungan merupakan satu kesatuan.

Manusia sebagai komponen lingkungan hidup menempati dan melakukan proses dalam suatu ruang yang yang dirancang, dan dibentuk serta dipelihara untuk dapat mempertahankan dan melangsungkan hidupnya sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Berbagai perilaku manusia dalam kehidupan dan penghidupannya ini diyakini bermula pada perubahan yang tercermin dari kebudayaan dan tingkat peradabannya. Produk dari tata ruang adalah cermin dari kebudayaan dan peradabannya.

2.2. Tiga Unsur Pengubah Matra Bali

Tiga unsur utama yang akan bergerak mengubah matra Bali (darat, laut, dan udara) yang diimplemnetasikan ke dalam Tata Ruang dan Lingkungan Hidup di Bali adalah Lahan. Penduduk, dan Ekonomi beserta faktor ikutannya. Lahan secara kuantitas dipandang tidak berubah ! Namun dengan sentuhan teknologi ; perluasan dan peningkatan kuantitas maupun kualitas dapat dilakukan! Akan tetapi harga lahan akibat pertumbuhan ekonomi ataupun pertumbuhan penduduk akan memicu pemanfaatan lahan lebih cepat dari perencanaan dan akhirnya bermuara pada perubahan ekosistem.

2.2.1 Lahan

Adapun luas Pulau Bali, relatif tetap yaitu berada pada kisaran 563,286 Ha. Perubahan fungsi pemanfaatan lahan sangat berpengaruh pada ekosistem masing – masing wilayah hingga bermuara pada satu kesatuan pulau. Perubahan yang paling kencang akhir–akhir ini adalah pada fungsi lahan sebagai sawah (terhitung sejak 1992 – 2001, 6.511 HA sawah telah beralih fungsi) bahkan dibeberapa subak di kabupaten Badung dan Denpasar tinggal nama saja. Perubahan fungsi lahan sawah antara lain karena adanya peningkatan permintaan perumahan dan permukiman, akomodasi pariwisata, infrastruktur berupa

jalan, dan lainnya.

Ditetapkannya 15 kawasan pariwisata di Bali melalui Perda Nomer 4 Tahun 1999 juga ikut menjadi pemicu berubahnya fungsi-fungsi lahan disekitar wilayah tersebut. Kawasan pinggir pantai hampir sebagian besar telah berubah wajah menjadi hotel, restaurant, cafe, dan rekreasi, dan lainnya. Bahkan di beberapa desa, khususnya Ubud dan sekitarnya hampir sepanjang tepi sungainya telah dimanfaatkan untuk fasilitas pariwisata. Ke 15 kawasan dimaksud direncanakan sebagai kawasan pariwisata terbuka seluas 99.226 Ha (18 % luas daratan Bali), sedangkan keperluan akomodasi dan fasilitas penunjang kepariwisataan secara efektif luasannya adalah 12.497 Ha (2,2% luas Bali).

Demikian pula terhadap adanya upaya penebangan hutan untuk memanfaatkan kayu lokal sebagai bahan bangunan dan keperluan cinderamata bagi wisatawan ikut meramalkan adanya perubahan struktur fungsi lahan. Kondisi ini diperparah lagi oleh para petani yang merubah lahan perkebunannya ke tanaman yang perlu sinar matahari dan air yang banyak (misalnya kebun jeruk di Kintamani) ikut memicu rakusnya daya serap air dan mengurangi konsumsi air di wilayah dataran rendah sekitarnya, bahkan dapat pula berakibat pada bahaya longsor.

Sebagai gambaran konkret, diperoleh data bahwa untuk luas kawasan hutan yang ideal adalah 30 % dari luas wilayahnya. Padahal hingga tahun 2.000 yang lalu total luas hutan di Bali sekitar 23,2 % dari luas pulau Bali atau sekitar 130.686,01 Ha. Diperkirakan bahwa luasan kawasan hutan yang masih berhutan hanya 60% saja, sedangkan sisanya sudah mengalami kerusakan dan menjadi hutan yang sangat kritis (Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bali Tahun 2005, hal III-5-6). Bahkan dari sumber yang sama yang dipetik dari Bali Membangun 2003 dituliskan pula bahwa lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan telah mencapai 286.938,00 Ha atau 50,9 % dari luas daratan Bali.

2.2.2 Penduduk

Mangku Pastika selaku Gubernur Bali menyatakan bahwa penduduk Bali di Tahun 2010 ini telah mencapai 3,9 juta jiwa sesaat setelah upacara peringatan Hari Ulang tahun ke 52 Provinsi Bali di Denpasar baru-baru ini (Detik Bali, 31 Agustus-13 September 2010, hlm.18). Dengan demikian kepadatan penduduk di Bali untuk tahun 2010 terkoreksi menjadi sekitar 692 jiwa /km² nya. Jika kepadatan tersebut dikaitkan dengan standar WHO yang menetapkan 250 orang / KM², maka Provinsi Bali dapat dinyatakan sudah melewati ambang batas. Tingkat kepadatan tertinggi diperkirakan akan tetap dipegang oleh Kota Denpasar kemudian Badung, Gianyar, dan disusul Tabanan.

Alam Bali sebagai sebuah kepulauan dengan kekayaan flora dan fauna serta iklimnya mendudukan manusia bahwa segala sesuatu yang ada disekitarnya jika dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup harus dikelola dengan baik dan cermat. Masyarakat Bali yang secara tradisi hidup dan berpenghidupan dari sumber alam disekitarnya melalui warisan kearifan lokal yang diperoleh dari proses pengalaman yang sangat panjang. Sebuah sistem yang mengatur bagaimana mereka memandang alam semesta dengan isinya dicermati dan dilakoni sesuai dengan kepercayaannya.

Agama Hindu yang dipeluk oleh sebagian besar dari masyarakat Bali menjadi pedoman, tuntunan, dan cermin keseharian mereka. Manusia menjadi sumber sekaligus memposisikan dirinya sebagai makhluk hidup yang mengelola kehidupannya agar berkelanjutan dan berkecukupan. Segala sesuatunya dilihat sebagai sesuatu yang *equal*, seimbang, harmonis. Kearifan ini menunjukkan betapa masyarakat Bali ketika itu memandang bahwa hidup adalah tidak dalam kekurangan dan tidak pula berlebihan, posisinya ada dalam keseimbangan atau berkecukupan.

Tri Hita Karana adalah kristalisasi dari pandangan, pedoman, ataupun tuntunan peri kehidupan masyarakat Bali

masa lalu yang diyakini hingga sekarang sebagai sebuah filosofi. Seluruh aspek dan kegiatan hidup dapat ditarik, ataupun disinari oleh *Tri Hita Karana*. Mereka percaya bila hubungan harmonis yang terjadi antara manusia dengan alam, manusia dengan manusia, manusia dengan Tuhan, akan melahirkan kebaikan. Hubungan tersebut diterjemahkan sebagai *Parhyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan*. Kata kunci dari filsafat *Tri Hita Karana* adalah Keseimbangan.

Pertumbuhan dan pergerakan penduduk merupakan problem utama dalam penataan ruang dan lingkungan hidup. Jumlah penduduk yang besar adalah berkah sekaligus masalah. Demikian pula terhadap beragamnya penduduk dari segi suku, agama, etnik, ataupun tingkat perbedaan kesejahteraannya dan lainnya adalah potensi sekaligus juga masalah! Hidup dimanapun dengan siapapun ada masalah!

2.2.3 Ekonomi

Bali sebagai sebuah provinsi kepulauan dengan berbagai potensi dan keunikannya telah mampu menunjukkan keberhasilannya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Bali (Korry, hal 149, 2003) pada 1996 yang lalu mencapai 8,16% diatas ekonomi nasional 7,82%. Pada saat krisis ekonomi nasional pada 1997, pertumbuhannya mencapai 5,81 % lebih tinggi dengan ekonomi nasional yang ketika itu tercatat 4,70 %. Bahkan pada tahun 1998 yang lalu sebagai tahun puncak krisis perekonomian, Bali terkonstraksi-4,04 %, bandingkan dengan kontraksi ekonomi nasional yang mencapai 13,20%.

Demikian selanjutnya badai demi badai seperti Bom Bali I tahun 2002, Bom Bali II tahun 2005, flu burung, demam berdarah, dan lainnya menggoncang sendi-sendi perekonomian Bali dengan segala dampaknya ikut memicu terpuruknya perekonomian Bali. Namun dengan daya lenting yang dimiliki Bali dengan segera berbagai sektor perdagangan dan jasa diluar pariwisata tumbuh dan berkembang sehingga mampu

meredam keterpurukan yang terjadi! Sejujurnya harus diakui bahwa yang menyebabkan Bali mampu bertahan dari sudut perekonomiannya adalah karena sektor riil yang diciptakan oleh karena perilaku para pelaku ekonomi kecil, menengah, dan koperasi sebagai ujung tombak dari ekonomi kerakyatan.

Lonjakan penurunan di sektor primer sementara meningkat dengan signifikan di sektor tersier tentu juga menimbulkan dampak, salah satunya adalah pemiskinan. Pada tahun 1998 yang lalu jumlah penduduk yang berada pada kondisi pra KS dan KS I sejumlah 53.200 orang, sedangkan 3 tahun kemudian yaitu pada pra KS dan KS I meningkat sejumlah 253% atau sejumlah 135.195 orang. Dari buku laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Bali (hal III-86, 2005) dituliskan bahwa penduduk miskin di provinsi Bali sudah berjumlah 105.160 KK (13,09%). Dua kabupaten termiskin adalah Kabupaten Buleleng dan Karangasem, masing-masing 58.860 KK dan 44.552 KK. Dari sumber yang sama disebutkan pula bahwa laju pertumbuhan keluarga miskin di Bali adalah 6,68%. Semoga saja dengan berbagai badai yang menerpa perekonomian Bali akhir-akhir ini tidak menambah lagi jumlah penduduk yang berada pada garis kemiskinan.

Walaupun dinyatakan bahwa Kabupaten Buleleng dan Karangasem merupakan penyumbang terbesar terhadap kemiskinan namun harus diakui pula bahwa Kota Denpasar sebagai barometer Provinsi Bali juga menyimpan atau memiliki penduduk miskin dan sekaligus juga pengangguran. Diakui pula sesuai yang tertulis dalam draft RPJP Daerah tahun 2005-2025 bahwa sejak krisis 1997 hingga kini masih menyisakan masyarakat miskin. Bahkan dalam upaya menekan angka kemiskinan pemerintah kota menekankan pentingnya pemecahan masalah kemiskinan didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap yaitu, hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

Konsep perekonomian Bali "*Dharma, Artha, Kama, Moksha*" sangat luwes dan fleksibel serta tidak ketinggalan zaman. Dibalik konsep tersebut terkandung maksud bahwa kekayaan atau *artha* "penghasilan" yang diperoleh adalah untuk mencapai *moksha* "kesempurnaan" dengan landasan *dharma* "moral" melalui pengendalian keinginan "*kama*". Bisnis atau perekonomian dengan tujuan-tujuannya hendaknya dilandasi oleh moral. Perusahaan-perusahaan besar dunia kini berebut mengedepankan moral sebagai etos bisnisnya, apakah itu terhadap lingkungan, atau jiplak menjiplak, ataupun dalam merekrut manajer kini mengedepankan moral! Nah, Bali yang sudah memiliki kearifan lokal dalam perekonomian hendaknya maju lebih baik dari sebelumnya seiring dengan kemajuan Informasi dan Teknologi.

Prinsip dasar yang dipergunakan dasar atau pedoman pembangunan ekonomi Bali ke depan adalah mengetahui dengan tepat potensi sumber daya alam dan kualitas manusianya, kemudian harus dipahami pula bahwa segala kebutuhan tidak mungkin terpenuhi dari satu wilayah saja, akan ada ketergantungan ! Berangkat dari sisi yang sederhana ini perekonomian di Bali hendaknya dibangun dengan sebuah visi ketersediaan, ketergantungan, dan permintaan yang dikemas dalam sebuah pasar, sehingga antara konsumen dan produser harus memiliki penyelia, bahkan tidak hanya untuk kebutuhan lokal semata, mengingat potensi geografis yang ada sangat memungkinkan pasar diperluas ke wilayah nusantara dan internasional.

Untuk itu pembangunan infrastruktur berupa jaringan transportasi darat, laut, dan udara harus siap untuk mendukung rencana pengembangan yang menghubungkan pasar dimana saja. Dengan demikian Bali akan menjadi sebuah pulau jasa sehingga pertambahan nilai yang diperoleh mampu berjalan sejajar dengan pariwisata sekaligus menarik dunia agraris tumbuh sebagai pondasi pembangunan. Tentu sarana dan

prasarana lainnya seperti telekomunikasi, air bersih, kesehatan, keamanan, dan lainnya menjadi penting dan wajib hukumnya agar iklim investasi dapat tumbuh secara kondusif.

2.3 Dampak Tiga Unsur Pengubah Matra Bali

Tiga unsur pengubah matra Bali di atas bergerak saling silang pengaruh dan akhirnya melahirkan enam dampak utama dalam pembangunan berkelanjutan di Bali. Dampak-dampak tersebut, yakni.

2.3.1 Lingkungan

Pergeseran fungsi lahan cepat atau lambat akan membawa berbagai dampak terhadap lingkungannya, akurasi luas fungsi lahan sangat dibutuhkan disertai dengan upaya menyiapkan tata ruang yang mengatur pemanfaatan lahan Bali ke depan sesuai dengan visi pembangunannya sangat diperlukan agar Bali tidak tercabik-cabik oleh kepentingan sesaat para pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Semua pihak semestinya mengamankan RTRWP No16 tahun 2009 yang baru saja ditetapkan pemerintah dan yang lebih penting lagi adalah adanya kepastian, ketegasan dalam mengawal pemanfaatan lahan yang telah digariskan oleh tata ruang.

Akibat berbagai pertumbuhan dan sekaligus perubahan fungsi lahan, apalagi beberapa fungsi tersebut tumbuh menjadi lingkungan buatan maka akan berdampak pada tercemarnya lingkungan hidup, bahkan juga akan mampu mengubah ekosistem mikronya. Barangkali contoh yang paling nyata adanya hubungan timbal balik antara derasnya pembangunan dengan fungsi lahan adalah daerah disekitar danau Buyan. Surutnya air atau terjadinya pendangkalan adalah akibat saling silang pengaruh antara kebutuhan air yang meningkat dengan kurangnya daya serap permukaan akibat perubahan fungsi lahan menjadi perumahan atau fungsi pertanian. Dan ketika hujan mengguyur di sepanjang tahun 2011 ini kemampuan serap

lahan yang berkurang karena peralihan fungsi menyebabkan kenaikan air danau yang merendam wilayah sekitarnya.

Di beberapa daerah yang konsentrasi kepadatannya sangat tinggi terjadi degradasi nilai lingkungan bukan hanya karena tumbuhnya rumah kumuh belaka, tetapi air sumur dikhawatirkan tercemar bakteri coli tinja. Demikian pula kumpulan sampah yang tidak terdistribusi menjadikan banjir, bau dan asap yang menyesakkan warganya. Intrusi air laut seperti untuk wilayah Kuta dan Sesetan telah mencemari sumur penduduk, alkalinitas dan kesadahan air sumur mereka meningkat, bahkan di beberapa bibir pantai air lautnya juga sudah tercemari oleh beberapa zat kimia seperti deterjen, bahkan juga terjadi perubahan fisik akibat terjangan abrasi. Hal yang sama juga terjadi pada aliran air sungai yang juga telah dicemari oleh limbah industri yang berada di sekitarnya.

Publikasi yang mendunia tentang degradasi lingkungan di Bali oleh majalah *Time* yang ditulis oleh Marshall (2011: 6), adalah potret tentang Bali yang pantainya tercemar (sampah dan bakteri) di Pantai Kuta, keterbatasan infrastruktur (energi listrik-*blackout*, sarana jalan), persediaan air yang terbatas, kemacetan khususnya menuju bandara, dan kejahatan. Berbagai catatan yang mengemuka tersebut secara singkat dapat dimaklumi akibat percepatan pembangunan di Bali, khususnya Bali Selatan berdampak pada tidak terintegrasinya tata ruang dan tata lingkungannya. Bahkan tidak kalah menariknya ketika harian lokal *Bali Post* (Senin, 2 Mei 2011;1) merilis berita tentang tercemarnya 13 pantai di Bali, yaitu di pantai, Kuta, Sanur, Mertasari, Serangan, Benoa, Lovina, Soka, Tanjung, Candidasa, Padangbai, Tulamben, Gilimanuk, dan Pengambangan. Pencemaran tersebut merupakan hasil pantauan dari Badan Lingkungan Hidup Bali pada tahun 2010 lalu yang menjumpai kadar COD dan BOD di atas 7 ppm, dan di beberapa pantai ditemukan ada kandungan nitrit dan nitrat yang melebihi baku mutu lingkungan.

Dengan demikian, degradasi lingkungan terjadi lebih cepat bila terjadi perubahan fungsi lahan, tingkat kepadatan yang tinggi, jumlah penduduk yang padat, infrastruktur yang terbatas, perilaku dan kesadaran akan lingkungan, penggunaan bahan-bahan kimia (deterjen, pencelupan,dll), dan sebagainya. Berbagai penyebab dari penurunan kualitas lingkungan dapat dikelola jika rencana tata ruang diimplementasikan dengan baik dan benar.

2.3.2 Utilitas

Utilitas lingkungan dari unit terkecil sampai dengan kota/kabupaten hingga provinsi ataupun antar provinsi diperlukan untuk dapat menggerakkan roda kehidupan sekaligus juga untuk meningkatkan mutu lingkungan. Hal-hal yang berkaitan dengan utilitas untuk kajian ini, antara lain: 1). Saluran Irigasi, 2). Jaringan Drainase, 3). Jaringan Listrik, 4). Saluran Telepon, 5). Jaringan Jalan. Tumpang tindihnya beberapa jaringan ataupun saluran diatas setidaknya dapat memicu perubahan aliran air, perkembangan daerah, ataupun juga perubahan fungsi lahan. Perhatikan juga manfaat yang diberikan dengan dibukannya akses *sun set* dan *sun rise road* yang disertai pembangunan utilitas dan jaringan di sepanjang jalan tersebut.

Sampai dengan saat ini masih dijumpai bahwa keunikan ataupun juga kearifan lokal yang terjadi untuk saluran irigasi dan jaringan drainase di Bali menjadi satu, sehingga jika peralihan fungsi lahan sawah/tegal dalam satu wilayah subak akan berakibat pada berubah atau bahkan memacetkan aliran air, akhirnya juga ikut memacetkan jaringan drainase, demikian pula sebaliknya.

Utilitas yang berkaitan dengan listrik, sampai dengan saat ini Bali masih tergantung dengan penyediaan listrik dari Jawa yang disalurkan melalui jaringan kabel bawah laut. Kebutuhan listrik Bali sampai dengan saat ini terasa belum memadai, terlebih lagi dengan perkiraan bila kabel bawah laut

putus maka Bali mengalami kegelapan! Untuk mengantisipasi kekurangan dan persediaan mendatang Bali telah membangun pembangkit listrik di Buleleng dan satu lagi yang sedang dalam proses adalah usulan pembangkit listrik panas bumi di daerah Bedugul.

Di bidang telekomunikasi yang menggunakan jaringan telepon menunjukkan perkembangan yang sangat cepat. Kecepatan dan adanya berbagai alternatif berakibat perencanaan kurang cermat sehingga Bali kini dipenuhi bukan oleh kabel telepon sepanjang jalan, tetapi oleh menara telepon. Bali kini disebut juga pulau menara. Penataan jaringan telekomunikasi ini mendatang hendaknya dapat dikelola dengan lebih sederhana dan indah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan menaranya. Peningkatan penggunaan telepon genggam memudahkan masyarakat berhubungan kemana saja, termasuk semakin berkurangnya ada kegiatan penggalian tanah untuk kabel telepon.

Jaringan jalan adalah merupakan nadi dari pembangunan suatu wilayah. Ilmu wilayah menyatakan bahwa jaringan koneksitas antarwilayah sangat menentukan percepatan pembangunannya. Apakah hubungan jaringan tersebut dapat dilakukan melalui laut, udara, maupun darat harus dibangun simpul-simpul yang memudahkan untuk itu. Bandara Internasional Ngurah Rai, pelabuhan Benoa, Celukan Bawang, Padang Bai, Gilimanuk, dan lainnya merupakan potensi Bali untuk berhubungan antar provinsi dan dunia. Selebihnya sarana transportasi darat akan mengambil peran untuk menjalin dan menyatukan antar kota / kabupaten se wilayah provinsi Bali.

Kelancaran, kenyamanan, keamanan, adalah doktrin bagi pelaku transportasi. Oleh karenanya kemacetan yang terjadi di beberapa titik atau simpul jalan di pusat-pusat kota umumnya dipicu oleh meningkatnya kepemilikan mobil ataupun motor, penataan fungsi ruang, ataupun juga karena kesalahan pengaturan jadwal kegiatan sehingga kegiatan mengumpul

pada waktu tertentu yang akhirnya menjadikannya macet. Kepala Dinas Perhubungan Bali, I Made Santha dalam (Marshall, 2011:6) menyatakan bahwa lalu lintas bertambah buruk sehubungan dengan kepincangan pertumbuhan kendaraan bermotor yang tidak sebanding dengan pembangunan jalan baru. Marshall pada sumber yang sama menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan bermotor tiap tahun meningkat 12,42% dibandingkan pertumbuhan jalan baru yang 2,28%. Bahkan tidak jarang kemacetan juga disebabkan oleh perilaku para pelaku jalan yang tidak mengindahkan aturan.

Eksisting Bali dalam hal jaringan jalan panjang totalnya adalah 6.641,01 Km. Dari seluruh panjang jalan tersebut statusnya sebagai berikut: Jalan Negara sepanjang 405,93 Km, Jalan Provinsi sepanjang 886,98 Km, dan Jalan Kabupaten sepanjang 5.384,10 Km. Data tahun 2004 menyebutkan bahwa 85,57% dari panjang jalan di provinsi Bali dalam keadaan baik, 3,49% dalam keadaan sedang, dan 10,94% dalam keadaan rusak. Simpul-simpul jaringan jalan tersebut untuk keperluan penggantian moda transportasi dibangunlah terminal. Jumlah terminal transportasi darat di seluruh dataran Bali ini berjumlah 14 buah.

Upaya pengalihan kemacetan dengan membangun jalan STB (Serangan Tanjung Benoa) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Badung Selatan tahun 2002 lalu tampaknya tidak akan dilanjutkan karena beberapa kendala, dan akan digantikan dengan membangun *underpass* di simpang Dewa Ruci-Kuta dan JDR (Jalan Diatas Rawa) dari Benoa sampai di Nusa Dua.

Topografi, geografi, dan geologi Pulau Bali sangat menguntungkan, baik untuk saluran maupun jaringan drainase. Pengelolaan yang baik akan memberikan nilai tambah dalam menata dan memanfaatkan air permukaan serta air bawah tanahnya. Selama ini masih ada beberapa daerah yang kekurangan air, namun tidak dipungkiri pula bahwa masih ada air yang mengalir begitu saja terbuang ke laut bebas. Demikian

pula dengan konsep yang sama untuk listrik, telepon, dan transportasi hendaknya dikelola menjadi satu kesatuan konsep Bali mengingat jarak utara–selatan tidak lebih dari 80 Km dan timur–barat sekitar 200 Km. Jarak yang relatif pendek seharusnya dapat direncanakan dengan lebih baik dan terpadu.

2.3.3 Budaya

Budaya adalah sebuah media, proses, ataupun juga sebuah konsep yang dapat mempersatukan sekaligus menceraikan beraikan hubungan manusia satu dengan lainnya. Namun Budaya yang dilakoni dengan makna kearifan akan semakin memuliakan dan memperkaya budaya tersebut dan selanjutnya melahirkan peradaban.

Intinya adalah bahwa manusia sebagai makhluk berbudaya selalu dengan kemampuan cipta, karsa, dan rasanya melakukan penerimaan, penolakan, pencampuran, dan sebagainya terhadap berbagai permasalahan yang dihadapinya. Semakin kuat tantangannya umumnya membuahkan hasil yang semakin mulia pula.

Dinamika kebudayaan adalah terletak pada kunci adanya perubahan. Bila pernyataan yang mengemukakan bahwa yang kekal dalam pembangunan adalah perubahan, maka kebudayaan menjadi identik dengan pembangunan! Bila pembangunan dibahas atas dua sisi yaitu sisi pembangunan diri dan pembangunan fisik, maka kesesuaian pembangunan wadah “fisik” dengan diri “isi” akan memberikan peningkatan mutu SDA maupun SDM. Manusia yang cerdas akan mengelola alam lingkungannya dengan lebih bijaksana dan menggunakan teknologi untuk membantunya!

Pemerintah Daerah Provinsi Bali (dalam Pembangunan berkelanjutan secara konsepsional) menetapkan landasan pembangunan daerah Bali berwawasan budaya yang meletakkan kebudayaan sebagai potensi dasar pembangunan berkelanjutan. Adanya landasan pembangunan tersebut di atas sangat penting

terutama dalam menghadapi tantangan–tantangan ke depan yang semakin kompleks dihadapi lingkungan hidup maupun masyarakat Bali, seperti: Pembangunan akan mengalami peningkatan yang semakin tinggi, sehingga akan berpengaruh terhadap perubahan, transisi, dan transformasi kehidupan masyarakat.

Proses keterbukaan dan globalisasi akan semakin mendesak sehingga kehidupan masyarakat Bali tidak akan bisa dilepaskan dari pengaruh proses globalisasi dan keterbukaan yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat internasional.

Orientasi pembangunan akan tetap mementingkan keseimbangan material dan spiritual baik secara kuantitas maupun kualitas. Dalam kaitan ini kualitas sumber daya manusia menjadi sangat penting keberadaannya.

Peningkatan pembangunan juga menuntut adanya peningkatan kemampuan adaptasi dan kreativitas manusia agar tidak terisolasi dari proses pembangunan itu sendiri. Dalam kaitan ini, kebudayaan dapat berperan sebagai media adaptasi dan sumber kreativitas manusia.

2.3.4 Institusi

Institusi atau lembaga adalah sebuah organisasi yang ragam, fungsi, mekanismenya terbentuk sesuai dengan keperluannya. Struktur organisasi yang terbentuk merupakan jawaban tuntutan ruang dan waktunya. Keberhasilan sebuah lembaga disamping ditentukan oleh struktur organisasinya juga sangat ditentukan oleh orang-orang yang ada di belakang struktur tersebut dengan berbagai aturan yang ditetapkan atau disetujui. Kini dengan kemajuan IT maka keberhasilan juga sangat dibantu oleh adanya penguasaan informasi dan teknologi yang kian tidak mengenal batas.

Dengan demikian sebuah lembaga dapat berupa organisasi pemerintahan, swasta, ataupun kemasyarakatan, dan lainnya, adapun model, bentuk dan fungsinya sangat tergantung dengan

kepentingannya. Dalam pembahasan selanjutnya yang terkait dengan kelembagaan atau institusi yang merupakan organ pemerintahan akan dibahas dalam bab selanjutnya. Khusus pada bagian ini lebih menampilkan kekuatan dan perlunya serta peran lembaga tradisional yang dikenal sebagai desa adat, banjar adat, *sekehe*, dan lainnya akan disajikan untuk memperkuat konsep kearifan lokal untuk Adipura Provinsi Bali.

Uniknya pemerintahan di Bali menganut sistem dualisme yaitu nasional dan lokal bersanding bagaikan suami istri atau orang kembar. Lahirnya dualisme pemerintahan melalui kelembagaan diawali pada saat penjajahan Belanda dengan membentuk struktur birokrasi baru hingga ke tingkat desa melalui pembentukan desa dinas. Pembentukan desa dinas tersebut merupakan upaya untuk menandingi struktur kekuasaan desa tradisional yang telah berlangsung lebih dahulu ketika zaman pemerintahan masa lalu "kerajaan". Harmonisasi antara ke dua sistem tersebut sudah berlangsung atau merupakan warisan pemerintahan kolonial. Ke dua lembaga tersebut ketika itu baik yang dinas maupun adat tampaknya merupakan lembaga yang mengusung kepentingan politik ekonomi!

Menurut Pasek Suka Eling (132; 2005) menyebutkan bahwa Perda Provinsi Bali Nomor 3 tahun 2001 tentang Desa Pekraman yang telah di ubah dengan Perda Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 memuat landasan yang kuat tentang kelembagaan tradisional ini dengan banjar adatnya. Penanganan *Parhyangan*, *Palemahan*, dan *Pawongan* sebagai implementasi *Tri Hita Karana* dilaksanakan oleh lembaga ini. Selanjutnya disebutkan pula :

"Pelayanan umum dalam mengesahkan dan membantu kegiatan administrasi untuk pencatatan kelahiran, kematian, datang, pindah dan pencatatan perkawinan bagi krama desa / banjar, memberikan rekomendasi bagi pendirian tempat ibadah bagi ummat lain di *palemahan* desa *pakraman* yang bersangkutan, adalah contoh sebagai implementasi pelayanan diberikan oleh aparatur dan *prajuru* lembaga tradisional ini, dengan lebih dahulu melakukan *paruman* dengan seluruh krama

pendukungnya”.

Dengan demikian peran Desa *Pekraman* melalui *Banjar* Adat menjadi jelas bahwa Desa Adat dan perangkatnya tidak semata menjadi lembaga yang mengedepankan politik–ekonomi belaka seperti masa kolonial, namun juga dikembalikan sekaligus penambahan pada fungsi sosial–budaya. Dengan demikian desa adat kini menjadi lembaga ekonomi– politik–sosial–budaya. Sungguh berat dan mulia tugas desa adat. Sehingga tidak berlebihan pula pandangan Piere Bourdieu (dalam Dwipayana, 2003 : 53) yang menyatakan bahwa desa adat sesungguhnya berada di tengah–tengah medan kekuasaan! Selanjutnya disebutkan bahwa medan kekuasaan tersebut tercipta dalam serangkaian pertarungan kekuasaan yang melibatkan berbagai macam aktor dan struktur, dari tingkatan lokal maupun global.

Ujung tombak atau garda depan pemerintahan di Bali terletak di *banjar–banjar*. *Banjar* merupakan satuan unit terkecil dalam pemerintahan nasional maupun tradisional. Masyarakat Bali sebagai warga negara sekaligus warga setempat membangun sistem pemerintahannya dalam dua mekanisme kehidupan dan penghidupannya. Umum dikenal sebagai *Banjar* Dinas dan *Banjar* Adat. Masing-masing memiliki pembagian tugas yang jelas dan mengikat. Sekumpulan *Banjar* Adat atau satu *Banjar* Adat bernaung dalam sistem kelembagaan pemerintahan Desa Adat. Terkadang wilayah atau batas antara satu banjar adat dengan banjar adat lainnya atau antar desa adat batas–batas wilayahnya saling *seluk*. Belum ada batas–batas fisik yang jelas antar wilayah lembaga adat yang satu dengan lainnya.

Banjar adat inipun dalam sistem pemerintahannya mengenal lagi adanya lembaga-lembaga kecil lainnya yang mengelompokkan orang dari kelompok umur, kegemaran, pekerjaan dan lainnya masing-masing disebut *sekehe* teruna - teruni, *sekehe tuak*, *sekehe manyi*, dan lainnya. *Sekehe* merupakan sebuah grup atau dapat juga dianalogikan sebagai sebuah

departemen dari *banjar* adat yang mewadahi aktivitas sesuai dengan nama kegiatannya. *Sekehe* merupakan embrio sebuah masyarakat guyub belajar berorganisasi, dengan kata lain sebuah *sekehe* juga menjadi cikal bakal sebuah lembaga. Setidaknya-tidaknya para anggotanya dapat belajar tentang cara berbicara, memimpin pertemuan, membagi pekerjaan, bekerja sama, dan lainnya yang nantinya dapat berguna bagi organisasi atau lembaga yang lebih formal.

2.3.5 Pariwisata

Belajar dari potensi dan pengalaman pariwisata sejak awal tahun 1920, Bali menetapkan konsep Pariwisata Budaya "*Cultural Tourism*" melalui Peraturan Daerah Nomer 3 tahun 1974 yang selanjutnya disempurnakan melalui Peraturan Daerah nomer 3 tahun 1991 dan Peraturan Daerah nomer 5 tahun 1993 yang memperkuat ke duanya. Yang dimaksud dengan Pariwisata Budaya ketika itu (Perda Nomer 3 tahun 1991) adalah :

Jenis kepariwisataan yang dalam perkembangan dan pengembangannya menggunakan kebudayaan daerah Bali yang dijiwai oleh Agama Hindu yang merupakan bagian dari kebudayaan nasional sebagai potensi dasar yang paling dominan, yang didalamnya tersirat satu cita – cita akan adanya hubungan timbal balik antara pariwisata dengan kebudayaan, sehingga ke duanya meningkat secara serasi, selaras, dan seimbang.

Dengan demikian Pariwisata Budaya bagi Bali adalah suatu sebagai ideologi, roh, rambu, sekaligus sebagai solusi pengembangan pariwisata Bali sampai saat ini (Lanfant dalam Noorwati, 1999: 26).

Undang-Undang R.I. No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan agar sumber daya dan modal kepariwisataan dimanfaatkan secara optimal melalui penyelenggaraan kepariwisataan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional, memperluas dan me-

meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisata dan destinasi di Indonesia serta memupuk rasa cinta tanah air dan mempererat persahabatan antar bangsa (Depbudpar, 2009, dalam Anom, 2009).

Surat kabar *Fajar Wisata* (1 Agustus 2010: 7) memberitakan bahwa kunjungan wisman (wisatawan mancanegara) meningkat cukup tajam. Pada periode Januari-Mei 2010 saja jumlah kedatangan wisman sudah diatas 1.000.000 orang. Tingkat hunian hotel rata-rata di Bali juga sudah mulai merangkak naik mendekati angka rata-rata 70 %. Keadaan ini menyiratkan bahwa keadaan yang menunjukkan bahwa dengan kunjungan wisatawan yang mencapai 6.500 orang sehari masih menyisakan kamar hotel sekitar 30 %. Pada sumber yang sama, ketua DPC PHRI Badung I Gusti Rai Suryawijaya menegaskan bahwa kondisi tersebut memberikan sinyal bahwa jumlah kamar hotel di Bali sudah diambang batas, khususnya di Bali Selatan (Badung, Denpasar, dan Gianyar).

Pemkab Badung saja hingga tahun ini telah mengeluarkan izin pembangunan kondotel sejumlah 37 buah (12 diantaranya sedang dibangun). Disamping itu wilayah Badung juga semakin diminati oleh investor yang bergerak dibidang vila. Ketua BVA (Bali Vila Association) Ismoyo Sumarlan menyatakan bahwa baru 400 buah vila yang memiliki izin di Kabupaten Badung. Jumlah sarana akomodasi dari Disparda Bali tahun 2009 dituliskan bahwa akomodasi terdiri dari hotel, kondotel, vila, dan *homestay*, apartemen, dan nama lainnya berjumlah 2.079 unit dengan 44.848 kamar. Adapun sebarannya yang terbanyak terdapat di Bali Selatan, yaitu Badung sejumlah 622 unit atau sejumlah 25.998 kamar, Gianyar sebanyak 579 unit atau sejumlah 4.682 kamar dan Kota Denpasar dengan unit sejumlah 244 atau 7.655 kamar. Sisanya sejumlah 634 unit dengan 6.513 kamar tersebar di 6 kabupaten lainnya.

Selain pertumbuhan akomodasi, industri pariwisata Bali

juga didukung oleh pertumbuhan beraneka fungsi penunjang seperti: (1). Biro Perjalanan, pada tahun 1984 yang lalu Bali baru memiliki 18 *travel agent*, 11 diantaranya adalah cabang dan belum memiliki *tour operator*. Kini di Bali sudah beroperasi sekitar 483 *travel agent* dengan 83 diantaranya adalah cabang dan 6 *tour operator* yang berizin.

Maraknya perkembangan pariwisata di Bali dan semakin banyaknya orang-orang mencoba peruntungan di bisnis pariwisata masih banyak ditemui *agent* maupun *guide* yang bodong. (2). Rumah Makan / Restoran, setidaknya kini telah mencapai 1.655 unit yang dapat menampung 80.844 kursi. Jumlah ini kian bertambah lagi jika ditambahkan dengan bar / cafe sejumlah 537 unit. Fungsi diatas setidaknya dapat menjadi gambaran bahwa dibutuhkan tenaga kerja untuk mendukung kegiatan tersebut. Koran *Fajar Wisata* (1 Agustus 2010, hlm.7) menuliskan bahwa sekitar 200.000 tenaga kerja berkecimpung di hotel dan biro perjalanan pariwisata serta *guide* yang masih aktif saat ini sejumlah 5.075 orang.

Dunia industri pariwisata tidak hanya membutuhkan akomodasi, *travel agent*, *guide*, restoran, dan bar saja namun dampak dari kian maraknya pembangunan pariwisata adalah juga berdampak pada tumbuhnya Bank, BPR, LPD dan lembaga keuangan lainnya di Bali. Demikian juga pada distribusi berbagai produk elektronik, kendaraan bermotor, bahan bangunan, sarana pertanian, makanan dan minuman yang membuat peredaran uang di Bali kelima terbesar di Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Medan, dan Makasar. Akibatnya tentu dapat dirasakan bahwa peluang dunia usaha dan kerja semakin terbuka di dan bagi Bali. Bahkan darma Putra dalam Bali Post (29 Agustus 2010:2) menuliskan bahwa pariwisata secara nasional telah mampu menyediakan atau menciptakan lapangan pekerjaan bagi sekitar 6,5 juta penduduk Indonesia.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Bali tahun 1969 sebesar 10%. Pada tahun 1994, PDRB Bali melebihi 2 miliar dolar

AS dan pendapatan perkapita mencapai 900 dolar AS. Peningkatan pembangunan pariwisata yang berkelanjutan berdampak pada peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat Bali dari tahun ke tahun berlangsung dengan meyakinkan seperti yang tercatat di tahun 2006 menjadi Rp 10,895 juta dengan PDRB berjumlah Rp 37,388 triliun. Pendapatan perkapita tersebut meningkat lagi secara signifikan ketika data tahun 2009 yang lalu menorehkan bahwa pendapatan perkapita masyarakat Bali telah mencapai rata-rata Rp 16,21 juta.

Wiranatha dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa atas dasar data tahun 1985–2005 dengan menggunakan model *trend power* proyeksi kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali 2006–2020 dapat diketahui. Hasil proyeksi tahun 2010 diperoleh angka sejumlah 1.757.000 wisman, tahun 2015 menjadi 2.002.000 wisman, dan di tahun 2020 yang akan datang diproyeksikan menjadi 2.237.000 wisman. Jumlah tersebut di atas belum termasuk kunjungan wisatawan mancanegara yang tidak langsung ke Bali dan kunjungan wisatawan domestik ke Bali. Jika ditambahkan dengan kunjungan wisatawan mancanegara yang tidak langsung ke Bali dan kunjungan wisatawan domestik ke Bali maka akan dijumpai jumlah yang melebihi dari jumlah penduduk Pulau Bali yang pada tahun 2010 diproyeksikan berjumlah 3,9 juta jiwa.

Jumlah wisatawan domestik yang berkunjung ke Bali diasumsikan 2 kali jumlah wisatawan mancanegara yang langsung ke Bali. Peran wisatawan domestik sangat dirasakan peran dan kehadirannya pascabom Bali I dan II. Pasar wisatawan domestik sangat membantu perekonomian Bali. Walaupun lama tinggal maupun uang yang dibelanjakannya lebih sedikit namun karena kehadirannya lebih banyak dari wisatawan mancanegara maka manfaat ekonomi dan keberlangsungan pembangunan pariwisata walaupun tersendat, namun sangat membantu.

Ardika dalam makalahnya I Nyoman Darma Putra dan I Gde Pitana dengan judul Pariwisata Pro-Rakyat Peretas

Jalan Pengentasan Kemiskinan yang dipresentasikan pada 28 Agustus 2010 dalam seminar di Universitas Udayana dengan jelas menegaskan bahwa kebutuhan untuk berwisata ternyata terbukti tidak dapat dihentikan oleh krisis! Petikan pendapatnya sebagai berikut :

... ketika krisis pecah tahun 1998, penurunan angka kunjungan secara kumulatif mencapai 30,40 %, namun secara umum sampai 2002 kunjungan wisatawan nasional secara kumulatif tumbuh meyakinkan, sebesar rata-rata 9,40 %; dengan rincian 4,31 % untuk wisatawan asing dan 10,20 % untuk wisatawan domestik.

Selanjutnya Ardika pada sumber yang sama juga menyatakan bahwa pariwisata telah memberikan sumbangan signifikan terhadap pendapatan negara, yaitu Rp 38 triliun diraih dari kunjungan wisman, Rp 69 triliun dari kunjungan wisnus. Sumbangan ini menurutnya menumbuhkan investasi senilai Rp 15 triliun, dan 8,16% lapangan kerja yang berarti tersedianya 17 juta lapangan kerja secara nasional yang secara lebih luas menyentuh juga sektor informal dan usaha mikro.

Untuk mengetahui jumlah berapa besar jumlah dana yang dikeluarkan oleh para wisatawan mancanegara maupun domestik digunakan pendekatan yang bersumber dari hasil penelitian Wiranatha, dkk yang dituangkan dalam buku *Analisis Kebutuhan Akomodasi dan Transportasi Pariwisata Bali* (2008:12) yang dikutip sesuai aslinya sebagai berikut:

Lama tinggal wisatawan di Bali sejak tahun 1994 sampai tahun 2000 cenderung meningkat, dengan lama tinggal rata-rata tahun 2000 selama 11 hari untuk wisatawan mancanegara dan 5,9 hari untuk wisatawan nusantara. Sedangkan pengeluaran wisatawan per orang per hari dalam periode yang sama cenderung turun yakni tahun 2000 sebesar 77,35 dolar Amerika untuk wisatawan mancanegara dan 20,04 dolar Amerika untuk wisatawan nusantara. Namun pada tahun 2002 terjadi penurunan lama tinggal rata-rata wisatawan yaitu menjadi 9,5 hari bagi wisatawan mancanegara dan 5,3 hari untuk wisatawan Nusantara.

Bali sebagai tujuan wisata memiliki atau memancarkan daya tarik tersendiri bagi wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Khusus bagi wisatawan mancanegara yang langsung ke Bali berdasarkan negara pasar utama tahun 2008 yang lalu paling banyak dikunjungi oleh wisatawan dari negara Jepang sejumlah 18,02 %, kemudian Australia sebanyak 15,68 %, dan Korea Selatan sejumlah 6,73 %.

Data Biro Pusat Statistik Provinsi Bali mencatat kunjungan wisatawan mancanegara dari negara Australia pada Bulan Januari–Juni 2010 mencapai 278.049 orang. Sementara pada bulan Januari-Juni 2009 hanya 180.686 orang. Dari perbandingan angka tersebut terjadi peningkatan 53,89 % dalam setahunnya (*Radar Bali*, Senin 23 Agustus 2010:27).

2.3.6 Transportasi

Transportasi memiliki hubungan yang sangat erat dengan tata ruang. Oleh karenanya penataan ruang antar kota dengan kota kabupaten seharusnya memperhatikan dan berpedoman dengan tata ruang regional dan nasional. Bahkan untuk jaringan transportasi laut maupun udara dapat memetakan jalur atau jaringannya.

Bali dengan posisi letak geografisnya yang sangat strategis seharusnya dapat berperan mengambil kesempatan tersebut untuk membangun dan mengembangkan jaringan laut dan udaranya dengan lebih luas dan beragam. Bali dapat saja tumbuh dan berkembang menjadi pusat impor dan ekspor sekaligus penyalur untuk wilayah Indonesia Tengah atau katakanlah yang lebih dekat hanya wilayah Nusa Tenggara.

Meningkatnya pendapatan disatu sisi, disisi lain ikut memicu peningkatan jumlah kendaraan bermotor, ataupun juga bertambahnya jumlah pelancong baik wisatawan domestik maupun manca negara. Maka lengkaplah sudah beban Bali dari sudut transportasi, bahwa jumlah penduduk yang meningkat, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, jenis moda

transportasi yang sangat variatif, sementara jalan tumbuh tidak sejalan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan pengendaranya sehingga betapa penuh sesaknya transportasi di pusat-pusat kota.

Manajemen pengaturan lalu lintas “transportasi” sangat dibutuhkan bukan hanya untuk kenyamanan para pelaku, akan tetapi lebih pada dampak yang diakibatkannya, seperti polusi, suara, asap, dan lainnya. Bahkan yang sering terlupakan sebagai sebuah akibat dari tuntutan kenyamanan berlalu lintas maka pemerintah membangun sarana jalan dengan cara melapis asphalt *hot mix* hampir setiap tahun pada ruas-ruas jalan tertentu. Perubahan perbedaan ketinggian permukaan jalan dengan pelapisan berkelanjutan kini mengubah lingkungan dan akhirnya berdampak pada ekosistem.

Untuk keperluan transportasi antar provinsi “pulau” atau negara dipergunakan transportasi laut dan udara. Pelabuhan kapal laut antar pulau ada di Gilimanuk (Barat Bali), dan Padang Bai (Timur Bali), Benoa (Selatan Bali), dan sebuah di Bali Utara. Masing – masing pelabuhan tersebut keberadaannya dengan fungsi masing-masing, bahkan ada yang tercampur dengan fungsi pariwisata. Diluar pelabuhan besar dan antar pulau tersebut ada pula pelabuhan–pelabuhan kecil yang dipergunakan oleh masyarakat antar kota/kabupaten, sebutlah pelabuhan Sanur, dan Kusamba yang menghubungkan Nusa Penida. Demikian pula pelabuhan nelayan yang hampir tersebar diseluruh pesisir pulau Bali seperti, Jimbaran, Sangsit, dan lainnya. Wacana yang menarik di tahun 2011 ini adalah adanya keinginan (bukan kebutuhan) untuk membangun bandara internasional di Bali Utara.

2.4 Upaya Penyelamatan Tata Ruang dan Lingkungan Bali

Sangat disadari bahwa unsur-unsur pengubah matra Bali dapat dilakukan melalui tertib pembangunan. Tertib pembangunan dapat dilakukan bila ada saling pemahaman

antara yang mengatur dengan yang diatur melalui aturan yang telah ditetapkan yaitu Perda No 16 tahun 2009. Beberapa hal yang sangat penting dan perlu dalam penyelamatan ruang dan lingkungan di Bali telah dengan jelas digambarkan pada RTRWP Bali no 16 tahun 2009, Bab V tentang Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi (2009: 83) adalah penegasan tentang adanya kawasan lindung dan kawasan budi daya.

Kawasan lindung yang tertulis di pasal 42 pada sumber yang sama ditetapkan Jenis dari Kawasan Lindung seluas 175.577 Ha atau 31,2 % dari luas Pulau Bali, yaitu.

- 1) Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya adalah kawasan hutan lindung yang luas keseluruhannya adalah 95.776,06 Ha atau 17% dari luas pulau Bali dan kawasan resapan air yang mencakup seluruh kawasan hutan dan kawasan hulu DAS di Provinsi Bali.
- 2) Kawasan Perlindungan setempat. Kawasan perlindungan setempat mencakup: kawasan suci, kawasan tempat suci, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, kawasan sempadan jurang, kawasan sekitar danau atau waduk, dan ruang terbuka hijau kota. Sedangkan yang dimaksudkan dengan kawasan suci adalah kawasan suci gunung, kawasan suci danau, kawasan suci campuhan, kawasan suci pantai, kawasan suci laut, dan kawasan suci mata air. Khusus yang dimaksud dengan kawasan tempat suci adalah a). Radius kesucian kawasan *Pura Sad Kahyangan*, b). Radius kesucian kawasan *Pura Dang Kahyangan*, dan c). Radius kesucian *Pura Kahyanga Tiga* dan pura lainnya.
- 3). Kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya seluas 25.727,43 Ha mencakup: a). Kawasan suaka alam, b). Kawasan pantai berhutan bakau, c). Kawasan taman

nasional dan taman nasional laut, d). Kawasan taman hutan raya, e). Kawasan taman wisata alam dan taman wisata alam laut, f). Kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, dan g). Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

- 4). Kawasan rawan bencana alam terdiri dari, kawasan rawan tanah longsor, kawasan gelombang pasang, dan kawasan rawan banjir.
- 5). Kawasan lindung geologi mencakup: a). kawasan cagar alam geologi yang terdiri dari kawasan rawan letusan gunung berapi, kawasan rawan gempa bumi, kawasan rawan gerakan tanah, kawasan rawan yang terletak di zona patahan aktif, kawasan rawan tsunami, kawasan rawan abrasi, kawasan rawan bahaya gas beracun, dan kawasan rawan intrusi air laut. b). kawasan rawan bencana alam geologi, dan kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah.
- 6). Kawasan lindung lainnya terdiri dari, kawasan perlindungan plasma nuftah, terumbu karang, kawasan koridor atau alur migrasi bagi jenis satwa atau biota laut yang dilindungi.

Upaya pemerintah dalam mengelola sekaligus mengendalikan kawasan lindung disusun dan dilengkapi dengan pedoman operasional atau tata cara implementasinya, seperti kriteria hutan lindung (kemiringan lereng, ketinggian di atas 2.000 meter dpl, bhisama PHDP tahun 1994), pengaturan sempadan pantai, sungai, jurang, dll. Keberpihakan ini adalah untuk menyelamatkan matra ruang Bali melalui tata ruang dan tata lingkungan.

Keberpihakan pemerintah untuk menyejahterakan masyarakatnya melalui kawasan lindung disertai pula dengan menata kawasan budi daya. Adapun isi dan luas kawasan budi

daya adalah seluas 388.089 Ha atau 68,9 % dari luas Pulau Bali. Untuk mengendalikan perubahan tata ruang dan lingkungan Bali akibat dari eksplorasi kawasan budi daya dikelola melalui Peraturan Gubernur.

Disamping itu hal lainnya yang sangat penting sesuai dengan yang diatur dalam UUPR No.26 tahun 2007 adalah Penetapan Kawasan Strategis yang ditetapkan atas dasar : 1). Pertahanan dan keamanan, b). Pertumbuhan ekonomi, c). Sosial dan budaya Bali, d). Pendayagunaan sumber daya alam dan/ atau teknologi tinggi, dan e). Fungsi dan daya dukung lingkungan hidup. Untuk kepentingan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dapat saja berimpitan dengan RTRK Strategis Nasional maupun Kota / Kabupaten. Siapa dan apa yang ditata, dikelola hendaknya dapat diselesaikan atas dasar peraturan yang telah ada.

Didalam arahan pemanfaatan ruang wilayah provinsi perwujudan kawasan lindung, perwujudan kawasan budi daya, dan perwujudan kawasan strategis adalah merupakan indikasi program utama perwujudan pola ruang. Sedangkan perwujudan struktur tata ruangnya meliputi, perwujudan PKN, PKW, PKL di wilayah provinsi serta perwujudan sistem prasarana nasional dan wilayah dalam wilayah provinsi yang mencakup a). Perwujudan sistem prasarana transportasi darat, laut dan udara, 2). Perwujudan sistem prasarana energi, c). Perwujudan sistem prasarana telekomunikasi, d). Perwujudan sistem prasarana sumber daya air, dan e). Perwujudan sistem prasarana lingkungan.

Demikian luas, rumit, saling terkait dan tentu sulit untuk menghafal bila tidak disertai dengan pemahaman gambar spatial sesuai dengan kedalamannya. RTRWP No 16 tahun 2009 sudah mengapresiasi berbagai fakta masa lalu, kini dan yang diperkirakan akan terjadi 20 tahun mendatang. Kewajiban kita adalah melaksanakan dan melanjutkan turunan dari RTRWP yang belum ada. Dan yang terpenting adalah mari berpikir

bahwa Bali adalah sebuah pulau yang harusnya dikelola dengan spirit “Kemanunggalan yang Beragam”

3. Penutup

RTRWP Bali no 16 tahun 2009 dilandasi oleh pemerintah daerah telah dirancang sesuai dengan arahan dari UUPR no 26 tahun 2007. Artinya substansi bersandar pada Perda no 3 tahun 2005 kemudian berkiblat pada UUPR no 26 tahun 2007 disertai dengan kearifan lokal yang pada era posmodern ini seharusnya mendapat posisi strategis. Patut dibanggakan bahwa Perda no 16 tahun 2009 ditetapkan sesuai dengan batas waktu (2 tahun) yang digariskan oleh UUPR. Tiga tahun kemudian yaitu pada tahun 2010 seharusnya seluru kabupaten/kota sudah harus memiliki Perda RTRWK masing-masing. Beberapa diantaranya kini sedang proses konsultasi di Jakarta.

Data terbaru menyebutkan, dari 33 provinsi di Indonesia, baru 11 provinsi yang telah mendapat persetujuan PU. Dari jumlah tersebut, enam provinsi yang telah menyelesaikan penyusunan rencana tata ruang dan wilayah hingga membuat peraturan daerah, sedangkan lima daerah lainnya dalam tahap pembuatan perda. Keenam provinsi tersebut yaitu Bali, Sulawesi Selatan, Yogyakarta, Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Jawa Tengah. Provinsi Bali dan Sulawesi Selatan menyelesaikan Perda RTRW-nya sejak tahun 2009. Sedangkan, yang menyelesaikan hingga Juni tahun 2010 adalah Yogyakarta, Lampung, NTB, dan Jawa Tengah.

Atas prestasinya secara akademis sudah selayaknya jika RTRWP No 16 tahun 2009 dilaksanakan dan ditegakkan untuk penyelamatan ruang dan lingkungan matra Bali secara berkelanjutan.

Beberapa rekomendasi yang dapat diusulkan melalui kajian di atas antara lain:

a. Bagi Provinsi

- 1) Segera meluncurkan Pergub sesuai dengan skala

prioritasnya.

- 2). Provinsi segera menyusun RTR Kawasan Strategis.
- 3). Dalam pengendalian pemanfaatan ruang provinsi, provinsi harus memiliki :
 - a. arahan peraturan zonasi sistem provinsi,
 - b. arahan perizinan,
 - c. arahan pemberian insentif dan disinsentif, dan
 - d. arahan sanksi.
- 4). Selalu berupaya meningkatkan koordinasi melalui lembaga yang telah ada (misalnya BKPRN dan BKPRD).
- 5). Menindak tegas pelanggaran
- 6). Upaya sosialisasi yang berhubungan dengan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup dilakukan secara berkala dan bekerja sama dengan media audio visual dan media cetak.

b. Bagi Kabupaten / Kota

- 1). Segera merampungkan Perda RTRWK yang berpedoman pada RTRWP Bali No.16 tahun 2009 dan UUPR No 26 tahun 2007
- 2). Masing-masing kabupaten / Kota agar menyusun RTR Kawasan Strategis Kabupaten.
- 3). Masing-masing Kabupaten/ Kota agar sudah menyusun RDTR Kawasan (Kecamatan, Desa)
- 4). Masing-masing kabupaten/kota agar segera menyusun Rencana Zonasi
- 5). Masing-masing kabupaten/kota agar segera menyusun Peraturan Zonasi.
- 6). Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang dengan meningkatkan pengawasan dan memperketat perizinan.

Harapannya adalah bahwa dengan diterapkannya Perda No. 16 tahun 2009 Pembangunan Bali berkelanjutan dapat berlangsung dan dapat dinikmati oleh generasi penerus. Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan maka unsur-

unsur pendukung pembangunan, seperti sumber daya alam hayati dan non hayati, sumber daya buatan maupun sumber daya manusianya diperlukan dalam keadaan berimbang. Dengan kata lain, kebijakan pembangunan pada berbagai sektor haruslah dapat berlangsung sinergis antara kebijakan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, sosial, ekonomi, budaya dan bidang– bidang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwipayana, A.A.G.N. Ari. 2003. Genologi Politik : Desa Adat Bali dan Ruang Demokrasi. Dalam : *Bali Menuju Jagadhita : Aneka Perspektif*. Editor, I Nyoman Darma Putra. PT. Offset BP Denpasar. Denpasar.
- Eling, I Gde Pasek Suka. 2005. Perkembangan Kelembagaan dan Pelayanan Birokrasi Menuju Tahun 2010. Dalam: *Kota Denpasar Menuju Tahun 2010 Perspektif Holistik Futurologi* (Kumpulan Karangan Tentang Urbantrend). Editor, I Wayan Geriya. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar. Denpasar.
- Korry, Nyoman Sugawa.2003. Strategi Pembangunan Ekonomi Provinsi Bali (Aspek Kebijaksanaan Pemerintah), dalam Buku *Strategi Pembangunan Ekonomi Bali*. Editor, Komang Suarsana. PT. Bali Post. Denpasar.
- Marshall, Andrew. 2011. Postcard: Bali. Time Vo.177, No.15, 18 April 2011, hlm.6. Hongkong.
- Picard, Michel. 2006. *Bali Pariwisata Budaya dan Budaya Pariwisata*. Jakarta. Kepustakaan Populer Gramedia Forum Jakarta-Paris.
- Putra, I Nyoman Darma dan I Gde Pitana. 2010. Pariwisata Pro-Rakyat Peretas Jalan Pengentasan Kemiskinan. Paper dipresentasikan pada Seminar Nasional Pariwisata dan Pengentasan Kemiskinan. Universitas Udayana, 28 Agustus 2010. Denpasar.
- Salain,Putu Rumawan. 2005. Kuta, Before, Now and Then from Traditional Village Towards Multi Ethnic City, dalam *The Possibility of Sustainable Cities and The Problems of International and Intellectual Exchange*. Editor : Prof I Gede Putu Wirawan, Ph.D dan Prof. Naoki Yoshihara, Ph.D. Universitas Udayana. Denpasar.

- Salain, Putu Rumawan.2006. Review Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Melalui Pendekatan Zonasi Ekonomi; Tanpa Menghilangkan Identitas dan Kebanggaan Budayanya. Kertas Kerja. Denpasar.
- Wiranatha, Agung Suryawan. Dkk. 2008. *Analisis Kebutuhan Akomodasi dan Transportasi Patiswisata di Bali*. Pusat Penelitian Kebudayaan dan Kepariwisata Universitas Udayana Bekerja Sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Denpasar.
- Wiranatha, Agung Suryawan. 2005. Laporan Status Lingkungan Hidup daerah Provinsi Bali Tahun 2005. Pemerintah Provinsi Bali.
- Wiranatha, Agung Suryawan.. 2009. Pariwisata dan Pembangunan Keruangan di Kabupaten Badung. Proseding Seminar Nasional. Puspem Badung, 6 Oktober 2009. Kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Badung, Program Magister Arsitektur UNUD dengan Ikatan Alumni Arsitektur UNUD. Udayana University Press.
- Wiranatha, Agung Suryawan. 2009. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009.Pemerintah Provinsi Bali. Denpasar.

Surat Kabar

- Detik Bali*, 31 Agustus-13 September 2010, hlm.18.
- Pantai Bali Tercemar.*Bali Post*, 2 Mei 2011, hal 1.
- Perlu Proses Pemberdayaan Agar pariwisata makin Dirasakan Manfaatnya. *Bali Post*, 29 Agustus 2010, hal 2. Denpasar.
- Subawa, I Made. 2010. Tren Desa Wisata, *Bali Post*, 2 Agustus 2010, hlm.3. Denpasar
- Subawa, I Made. 2010. Bali “koleksi” 75.635 Pengangguran,. *Bali Post*,5 Agustus 2010, hal 5.
- Subawa, I Made. 2010. Efek *Travel Advisory* Australia Rugikan Wisata. *Radar Bali*, 23 Agustus 2010.hal 27. Denpasar
- Pitana, I Gde.2010. Media yang Reliable. *Fajar Wisata*, 1 Agustus 2010,hlm.7-8.Denpasar.
- Pitana, I Gde. 2010. Bahaya Dibalik *Oversupply* Hotel : Perang Tarif Sampai Alih Kepemilikan. *Fajar Wisata*,1 Agustus 2010 hal 7-8. Denpasar.
- Pitana, I Gde. 2010. Pariwisata Itu Madu, Kitalah Yang Membuat Racun. *Fajar Wisata*,1 Agustus 2010 hal 7-8. Denpasar.

Putu Rumawan Salain

Pitana, I Gde. 2010. Penduduk Bali Lampaui Batas Ideal. *Detik Bali*, 31 Agustus -13 September 2010, hlm.18. Denpasar.

Pitana, I Gde. 2010. Bali *The Best Leisure Destination in Asia Pacific* 2010. *Detik Bali*, 31 Agustus-13 September 2010, hlm.20.Denpasar.

Pitana, I Gde. 2010. Pertumbuhan Ekonomi Bali Lebih Rendah daripada Nasional. *Bali Post*, 4 September 2010. Denpasar.